



PEMERINTAH KOTA BEKASI

KANTOR WALIKOTA BEKASI

LKIP 2024

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Bekasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur, LKIP juga bentuk bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bekasi menuju terwujudnya good governance dan clean governance serta sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali/pemacu dalam peningkatan kinerja di lingkup Sekretariat Daerah dimana Kinerja tersebut diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024.

Adapun substansi pada LKIP ini antara lain menguraikan sasaran yang telah dicapai berdasarkan Misi Sekretariat Daerah, juga memuat deskripsi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian/solusi berikut tindaklanjut yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam

mengatasi hambatan tersebut. Sehingga diharapkan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh aparatur Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang. Dalam penyusunan LKIP ini kami telah berupaya secara optimal dengan mengikuti sistematika serta berpedoman pada peraturan-peraturan diatas, namun Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini sangat kami harapkan. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 ini menjadi bagian dari konsistensi kami terhadap komitmen untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja secara terukur dan akuntabel.

Bekasi, Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH

Drs. JUNAEDI



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2024 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2024-2026.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 Sekretariat Daerah Kota Bekasi menetapkan 1 tujuan, 6 sasaran yang di turunkan melalui 19 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan dimana terdapat 5 indikator sasaran yaitu Persentase Capaian IKK yang meningkat, Indeks Pelaksanaan Pembangunan, Nilai IKM Setda, Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas, Nilai AKIP Setda.

Rincian realisasi target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja Sekretaria Daerah Kota Bekasi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah					
1.	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Persentase Capaian IKK yang meningkat	40%	49.59%	123.97
2.	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	88	88.87	100.99
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP SETDA	A (82.04)	A (82.04)	100
		Nilai IKM SETDA	83	88.13	106.18

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	22,73	29.55	129.98

Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2024 dinyatakan “melampaui target”, karena capaiannya rata-rata sebesar 112.23% dari target, dengan rata-rata capaian indikator strategis melebihi target yang sudah ditetapkan. dengan hasil capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar 112.23% ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang SANGAT BAIK atas 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan guna mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2024 sebesar Rp.203.407.354.606,00,- atau 86.19% dari total pagu anggaran Rp. 235.997.078.013,00,- dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 12.23%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Organisasi.....	6
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	11
1.4 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi	13
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Perencanaan Strategis.....	17
2.1.1 Indikator Kinerja Utama.....	19
2.1.2 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	21
2.2 Perjanjian Kinerja.....	25
2.3 Rincian Anggaran Tahun 2024	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	34
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	36
3.3 Analisis Capaian Kinerja	38
3.4 Akuntabilitas Keuangan	87
3.5 Prestasi Dan Penghargaan	92
BAB IV PENUTUP	95
4.1 kesimpulan	95
4.2 Rencana Tindak.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja	100
LAMPIRAN 2 : Perjanjian Kinerja Perubahan	102
LAMPIRAN 3 Rincian Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2024	104
LAMPIRAN 4 Realisasi Fisik Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi 108	

LAMPIRAN 5 Prestasi Dan Penghargaan.....115

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Status Kepegawaian.....	9
Tabel 1. 2	10
Tabel 1. 3	10
Tabel 1. 4	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	11
Tabel 2. 1	Matriks Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2024 - 2026	18
Tabel 2. 2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi	19
Tabel 2. 3	Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	22
Tabel 2. 4	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi	26
Tabel 2. 5	Alokasi Anggaran Per Triwulan (APBD-P TA 2024)	27
Tabel 2. 6	Perbandingan Anggaran Per Sub Kegiatan Sebelum dan Sesudah Perubahan	28
Tabel 3. 1	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024	37
Tabel 3. 2	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian IKK yang meningkat	40
Tabel 3. 3	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat	43
Tabel 3. 4	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat dengan Target Akhir Renstra 2024-2026	46
Tabel 3. 5	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama... ..	47
Tabel 3. 6	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat	47
Tabel 3. 7	Analisis Pencapaian Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan	48
Tabel 3. 8	Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2024	50
Tabel 3. 9	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama Indeks Pelaksanaan Pembangunan	55

Tabel 3. 10	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Pelaksanaan Pembangunan Target Akhir Renstra 2024-2026	55
Tabel 3. 11	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran	57
Tabel 3. 12	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan.....	58
Tabel 3. 13	Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024	60
Tabel 3. 14	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP SETDA	61
Tabel 3. 15	Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi.....	61
Tabel 3. 16	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA	63
Tabel 3. 17	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026	64
Tabel 3. 18	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran	65
Tabel 3. 19	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA	66
Tabel 3. 20	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai IKM SETDA	67
Tabel 3. 21	Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2024.....	68
Tabel 3. 22	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama Nilai IKM SETDA.....	71
Tabel 3. 23	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai IKM SETDA Target Akhir Renstra 2024-2026	72
Tabel 3. 24	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran	73
Tabel 3. 25	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Nilai IKM SETDA	75
Tabel 3. 26	Perbandingan IKM Setda dengan OPD lain	75
Tabel 3. 27	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	79
Tabel 3. 28	Rekapitulasi Perbandingan Hasil Evaluasi AKIP	80

Tabel 3. 29	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	83
Tabel 3. 30	Perkembangan Nilai AKIP Kota Bekasi.....	83
Tabel 3. 31	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026	86
Tabel 3. 32	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	86
Tabel 3. 33	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan tahun 2024 Untuk untuk Indikator Kinerja Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	87
Tabel 3. 34	Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Per Program Tahun 2024	88
Tabel 3. 35	Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2024	88
Tabel 3. 36	Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Sub Kegiatan Tahun 2024	89
Tabel 3. 37	Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024	92
Tabel 4. 1	Capaian dari IKU tahun 2024.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	9
Gambar 3. 1 Grafik Perkembangan Nilai SKM Sekretariat Daerah	68

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Organisasi
3. Aspek Strategis Organisasi
4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi
5. Sumber Daya Manusia
6. Sistematika Penyajian Laporan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Daerah Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah, dimana pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Pemerintah Kota Bekasi merumuskan lima tujuan dan untuk kemudian di terjemahkan lebih rinci ke dalam 11 sasaran pembangunan. Kerangka umum tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dalam RPD Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah
		1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi
		2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
		2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender
		2.4	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota
3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan
4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	4.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat
		4.2	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana
5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi

No	Tujuan	Sasaran	
		5.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Sumber : RPD Kota Bekasi 2024-2026

Sekretariat Daerah dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis serta mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD Kota Bekasi, RPD Kota Bekasi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sesuai dengan tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendukung pada pencapaian Tujuan Kota Bekasi **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel”** dengan **“Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah”**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan suatu sistem pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretaris Daerah atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan LKIP Setda Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pengukuran kinerja instansi sekaligus mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2024 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Setda Kota Bekasi pada tahun yang akan datang sekaligus memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja.

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi yang termaktub dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026, maka disusunlah Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dimana indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang tercantum dalam Renstra tersebut adalah :

No	Sasaran RPD	Indikator Kinerja Sasaran RPD	Sasaran Renstra	IKU
1	Meningkatnya Kualitas	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan	Persentase Capaian IKK yang meningkat

No	Sasaran RPD	Indikator Kinerja Sasaran RPD	Sasaran Renstra	IKU
	Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Pemerintahan Daerah (EPPD)	bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosia	
			Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai IKM
				Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas Nilai AKIP Setda

Penentuan IKU ini didasarkan pada pencapaian 8 (delapan) area perubahan Indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi indikator tujuan pada RPD 2024-2026, dimana lima area perubahan yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, dan pelayanan publik dilaksanakan dengan Sekretariat Daerah sebagai *leading sector*.

Pada tahun 2023, capaian realisasi indikator kinerja utama Sekretariat Daerah mencapai rata-rata 108,12 persen, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa target kinerja yang belum tercapai, oleh karena itu, pada tahun 2024, Sekretariat Daerah Kota Bekasi perlu meningkatkan kinerja, baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2023, maupun terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk pembahasan lebih lanjut secara komprehensif kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada Laporan Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 ini.

1.2 Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Organisasi

Kedudukan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi. Selanjutnya untuk mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki tugas tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum untuk mencapai visi dan misi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;

- b. Pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum;
- c. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- d. Pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana Perangkat Daerah;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
- f. Pembinaan serta pengembangan organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;
- g. Pembinaan kesadaran hukum dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah;
- h. Pembinaan pelaksanaan hubungan dan/atau kerja sama pembangunan antar Daerah, antar Daerah dengan Pemerintah, antar Daerah dengan lembaga lainnya;
- i. Perumusan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota;
- j. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Wali Kota;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota;
- l. Penyampaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kinerja Setda sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi terdiri atas:

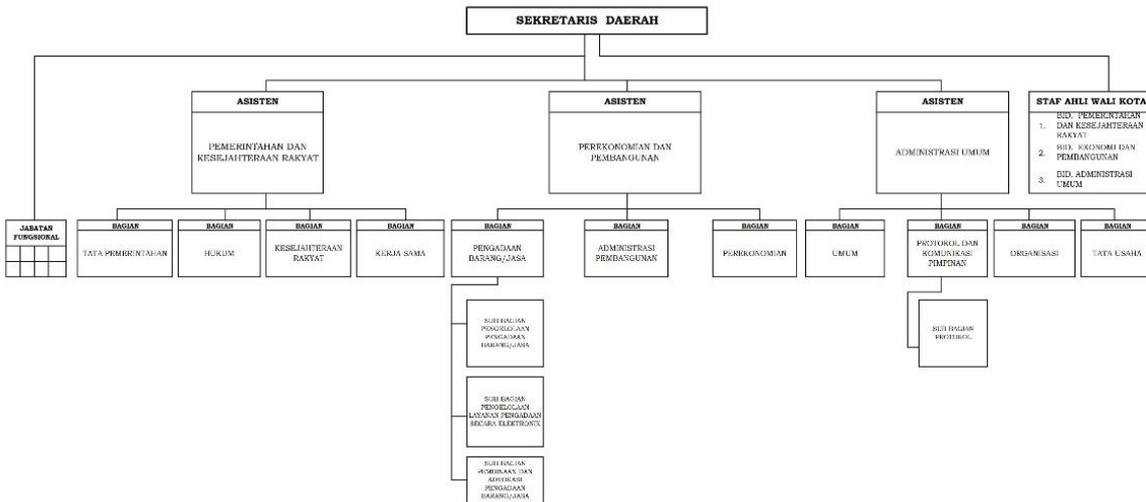
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Staf Ahli Wali Kota Bidang Administrasi Umum;
- e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;

2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 4. Bagian Kerja Sama;
- f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
1. Bagian Perekonomian
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Kesejahteraan Sosial;
 4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Membawahkan Sub Bagian Protokol;
 4. Bagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah seperti pada gambar berikut:

Gambar 1. 1

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi (Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024)



Sumber Daya Manusia

Salah satu instrumen dalam penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Sekretariat Daerah Kota Bekasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 389 orang per 31 Desember 2024 terbagi dalam 11 bagian dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1. 1
 Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Status Kepegawaian

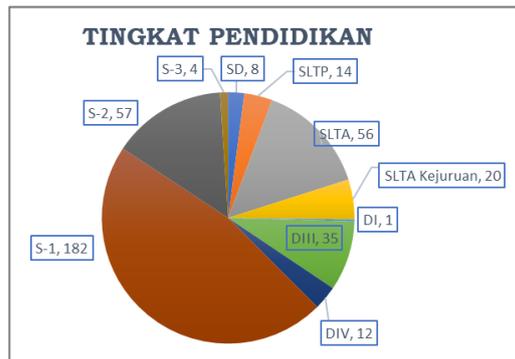
No	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	189
2.	Tenaga Kerja Kontrak	200
	Jumlah	389

Sumber : Data <https://siap.bekasikota.go.id/>, Per 31 Desember 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1. 2
 Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1.	SD	8
2.	SLTP	14
3.	SLTA	56
4.	SLTA Kejuruan	20
5.	DI	1
6.	DIII/Sarjana Muda	35
7.	DIV	12
8.	S-1	182
9.	S-2	57
10.	S-3	4
	Jumlah	389



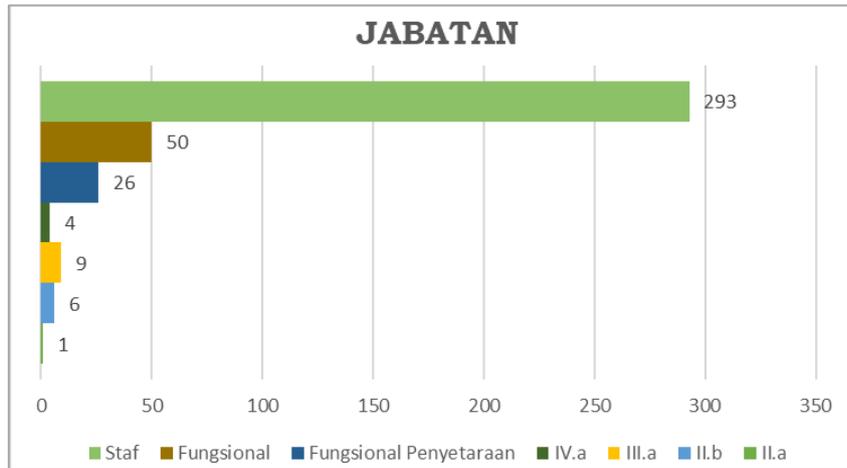
Sumber : Data <https://siap.bekasikota.go.id/>,
 Per 31 Desember 2024

Berdasarkan Jabatan

Tabel 1. 3
 Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1.	II.a	1
2.	II.b	6
3.	III.a	9
4.	IV.a	4
5.	Fungsional Penyetaraan	26
6.	Fungsional	50
7.	Staf	293
	Jumlah	389

Sumber : Data <https://siap.bekasikota.go.id/>, Per 31 Desember 2024



Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1. 4
 Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah
1.	laki	189
2.	perempuan	200

Sumber : Data <https://siap.bekasikota.go.id/>,
 Per 31 Desember 2024



1.3 Aspek Strategis Organisasi

Posisi dan peranan Sekretariat Daerah dalam mendukung Wali Kota dalam melaksanakan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah, memiliki peran yang sangat strategis. Dalam pelaksanaan benchmark position dan benchmark job, Sekretariat Daerah memiliki peranan terhadap pelaksanaan:

Sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat bahwa Sekretariat Daerah

“perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya”.

Kota Bekasi memiliki tugas lebih bersifat administratif. Kesempurnaan mekanisme sistem perencanaan, penganggaran biaya, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan keinginan yang dicita-citakan. Adapun permasalahan utama dan isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah:

1. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah;
2. Kurangnya Koordinasi dalam rangka Cipta Kondisi dan Stabilitas Wilayah;
3. Belum terdapat gambaran secara menyeluruh tentang karakteristik kelurahan dalam mengukur status kemajuan kelurahan swadaya ke swakarya menuju swasembada;
4. Lambatnya proses verifikasi data calon penerima hibah;
5. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat;
6. Belum optimalnya perumusan produk hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan;
7. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan bidang perekonomian;
8. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang administrasi Pembangunan;
9. Belum Optimalnya kualitas perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

10. Belum Optimalnya kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang kerjasama;
11. Belum optimalnya kualitas perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
12. Belum Optimalnya kualitas penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan Sekretariat Daerah;
13. Lambatnya hasil pembangunan di terima oleh masyarakat.

Melihat dari posisi dan peranan tersebut serta identifikasi isu-isu menjadi dasar Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam mengambil peran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2024-2026 yaitu: Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Yang Mengedepankan Prinsip Efisiensi, Efektifitas Dan Transparansi.

1.4 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan beberapa layanan publik yang dilaksanakan oleh 11 unit layanan dan sudah dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki saat ini, yaitu:

1. Pelayanan Desk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD).
2. Pelayanan Legal Drafting Produk Hukum Daerah.
3. Pelayanan Penomoran Produk Hukum Daerah.
4. Pelayanan Bantuan Hukum.
5. Pelayanan Pemberian Pendapat Hukum.
6. Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

7. Pelayanan Penyusunan Standar Pelayanan
8. Pelayanan Penyusunan Standar Pelayanan.
9. Pelayanan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
10. Pelayanan Evaluasi Kelembagaan.
11. Pelayanan Rekomendasi Penerima Hibah Di Kota Bekasi.
12. Pelayanan Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Bekasi.
13. Pelayanan Evaluasi Naskah Kerjasama.
14. Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Naskah Kerjasama.
15. Pelayanan Rencana Kerjasama.
16. Pelayanan Pendaftaran Calon Penyedia
17. Pelayanan Asistensi RKA satuan Kerja Yang Berhubungan Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
18. Pelayanan Penyusunan Standar Biaya Umum (SBU).
19. Pelayanan Administrasi dan Fasilitasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
20. Pelayanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Acara.
21. Pelayanan Peminjaman Ruang Aula.
22. Pelayanan Penyediaan Makanan dan Minuman.
23. Pelayanan Pemeliharaan Gedung Kantor.
24. Pelayanan Penomoran Surat.
25. Pelayanan Surat Masuk.
26. Pelayanan Penyerahan Piala Kepala Daerah.
27. Pelayanan Keprotokolan.
28. Pelayanan Fasilitasi Kunjungan Daerah Ke Pemerintahan Kota Bekasi.
29. Pelayanan Konsultasi Pemenuhan Eviden Reformasi Birokrasi
30. Pelayanan Konsultasi Pemenuhan Evidence Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2024-2026
- B. Tujuan
- C. Sasaran Strategis
- D. Sasaran Program
- E. Indikator Kinerja Utama
- F. Program dan Kegiatan
- G. Perjanjian Kinerja 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi (sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum)
- B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Akuntabilitas Anggaran (Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan dokumen kontrak kinerja)

- D. Prestasi Organisasi (mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional dalam tahun 2023)

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rencana Tindak

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2024-2026
2. Tujuan
3. Sasaran Strategis
4. Sasaran Program
5. Indikator Kinerja Utama
6. Program dan Kegiatan
7. Perjanjian Kinerja 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Perencanaan kinerja memiliki peran yang sangat penting dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, terutama setelah diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam setiap aspek pelaksanaan tugas pemerintahan, yang dimulai dari tahap perencanaan.

Dalam konteks ini, perencanaan kinerja menjadi alat utama untuk merumuskan sasaran dan indikator yang harus dicapai oleh setiap instansi pemerintah, serta menjadi dasar untuk mengukur sejauh mana kinerja tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Melalui perencanaan yang terstruktur dan jelas, instansi pemerintah dapat menyusun rencana yang realistis dan terukur, serta memastikan bahwa alokasi anggaran dan sumber daya sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perencanaan kinerja tidak hanya mendukung pencapaian hasil yang diinginkan, tetapi juga memastikan bahwa instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan secara transparan dan akuntabel.

2.1 Perencanaan Strategis

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023, untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada

tahun 2024, perlu ditetapkan rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Kota Bekasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Bekasi adalah menjadi “Bekasi Kota Kreatif yang Ihsan” menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam menyusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah 2024-2026 agar kebijakan dan program pembangunan di Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026 selaras dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Dalam Renstra 2024-2026 disebutkan tujuan Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah: **“Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah”**, dengan Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra, adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
 Matriks Perencanaan Kinerja
 Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2024-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target		
			2024	2025	2026
1	Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi.	100%	100%	100%

No	Tujuan/ Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target		
			2024	2025	2026
	pengelolaan layanan pemerintah				
1.1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosia	Persentase Capaian IKK yang meningkat	40%	40%	40%
1.2	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	88	88	88
1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai IKM	83	83	83
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas	22,73%	22,73%	22,73%
		Nilai AKIP Setda	A (82,04)	A (82,06)	A (82,08)

Sumber : Renstra Setda Kota Bekasi 2024-2026

2.1.1 Indikator Kinerja Utama

IKU atau Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses kegiatan dan kriteria indikator kinerja yang baik, sebagai dasar penilaian untuk setiap jabatan yang ada.

Pada penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2024-2026 ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator sasaran yang selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah Kota Bekasi 2024-2026. Adapun target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah menurut Rencana Strategis Tahun 2024-2026 beserta rumus perhitungan dapat disajikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2
 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan/ Rumus	Satuan	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan,	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Sebagai indikator keberhasilan instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,	(Capaian IKK yang meningkat / Seluruh Jumlah Untuk mengetahui jumlah IKK yang meningkat IKK) x 100%	Persen	40

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan/ Rumus	Satuan	Target Tahun 2024
	hukum dan kesejahteraan sosial		sekaligus alat ukur penting dalam proses perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.			
2.	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Untuk mengukur dan menilai sejauh mana suatu daerah atau negara berhasil melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan. Indeks ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan pencapaian dari kegiatan pembangunan dalam berbagai sektor, baik itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sektor lainnya	$\text{(Realisasi Pelaksanaan Kegiatan} \times 80\%) + \{[(\text{Jumlah Pengadaan sesuai ketentuan/ Jumlah pengadaan yang difasilitasi}) \times 40\%] + (\text{Indeks kepuasan masyarakat bagian PB} \times 60\%) \} \times 20\%$	Persen	88
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai IKM SETDA	Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Setda, yang umumnya meliputi pelayanan administrasi pemerintahan, koordinasi antar lembaga, serta layanan lain yang berkaitan dengan pemerintahan daerah	IKM = (Total dari nilai persepsi per unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai penimbang	Indeks	83
		Nilai AKIP SETDA	Mengukur sejauh mana Setda dapat mempertanggung jawabkan kinerja dan pelaksanaan tugas administratif pemerintahan kepada publik, serta sejauh mana Setda	hasil Evaluasi Inspektorat Kota Bekasi atas Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi	Nilai	A

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan/ Rumus	Satuan	Target Tahun 2024
			dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan			
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Mengukur sejauh mana OPD di tingkat daerah mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya	(Jumlah perangkat daerah yang menerapkan SAKIP berkualitas A / Jumlah perangkat daerah) x 100%	Persen	22.73

Sumber : Renstra Setda Kota Bekasi 2024-2026

2.1.2 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran

pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 3
 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi
				Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
				Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
2	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
					Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Program Administasi Umum	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pengadaan Mebel
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pemeliharaan Mebel
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
			Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Sumber : Renstra Setda Kota Bekasi 2024-2026

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan umum disusunnya Perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan

kinerja instansi pemerintah dengan menetapkan target kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja tahunan, maka target-target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi mengalami 1 (satu) kali perubahan, adapun kondisi yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan terkait adanya mutasi atau pergantian pejabat struktural dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Hal ini sudah sejalan dengan peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. *Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- b. *Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan*
- c. *Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.*

Tabel 2. 4
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Persen	40
2	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Persen	88

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A
		IKM SETDA	Indeks	83
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Persen	22.73

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II.a) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Pada penetapan APBD Kota Bekasi Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.229,444,689,696.00 yang digunakan untuk melaksanakan 19 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan yang terangkum dalam 3 program untuk kemudian terkoreksi pada APBD-P menjadi sebesar Rp.235,997,078,013.00 untuk melaksanakan 19 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran per triwulan sebagai berikut:

Tabel 2. 5
 Alokasi Anggaran Per Triwulan (APBD-P TA 2024)

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Triwulan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	168,239,110,235.00	Triwulan I	30,423,981,027
			Triwulan II	46,125,458,532
			Triwulan III	49,363,610,403
			Triwulan IV	42,326,060,273
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	60,816,173,157.00	Triwulan I	16,778,917,000
			Triwulan II	27,771,849,657
			Triwulan III	12,304,941,100
			Triwulan IV	3,960,465,400
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	6,941,794,621.00	Triwulan I	854,305,000
			Triwulan II	2,255,973,000
			Triwulan III	2,497,603,300
			Triwulan IV	1,333,913,321

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2024

2.3 Rincian Anggaran Tahun 2024

Sedangkan perbandingan rincian anggaran per kegiatan sebelum dan sesudah perubahan disajikan pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2. 6
 Perbandingan Anggaran Per Sub Kegiatan
 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Murni	Perubahan	Selisih
4.1.1	Sekretariat Daerah	229,444,689,696.00	235,997,078,013.00	6,552,388,317.00
4.1.1.1	Sekretariat Daerah	229,444,689,696.00	235,997,078,013.00	6,552,388,317.00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	161,612,078,196.00	168,239,110,235.00	6,627,032,039.00
1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184,000,000.00	184,000,000.00	-
1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	184,000,000.00	184,000,000.00	-
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55,683,893,840.00	57,444,093,340.00	1,760,199,500.00
1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55,633,893,840.00	57,394,093,340.00	1,760,199,500.00
1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50,000,000.00	50,000,000.00	-
1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	175,000,000.00	175,000,000.00	-
1.2.03.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	175,000,000.00	175,000,000.00	-
1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	495,000,000.00	495,000,000.00	-
1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	495,000,000.00	495,000,000.00	-
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,336,400,000.00	8,777,150,000.00	440,750,000.00
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000.00	180,000,000.00	30,000,000.00
1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,884,400,000.00	4,195,150,000.00	310,750,000.00
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300,000,000.00	300,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Murni	Perubahan	Selisih
1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,000,000.00	100,000,000.00	-
1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	500,000,000.00	600,000,000.00	100,000,000.00
1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,252,000,000.00	3,252,000,000.00	-
1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150,000,000.00	150,000,000.00	-
1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,739,016,976.00	27,339,016,976.00	2,600,000,000.00
1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6,600,000,000.00	9,200,000,000.00	2,600,000,000.00
1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,139,016,976.00	18,139,016,976.00	-
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19,011,273,420.00	19,006,273,420.00	(5,000,000.00)
1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,536,759,800.00	7,536,759,800.00	-
1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	792,182,500.00	792,182,500.00	-
1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,677,331,120.00	10,677,331,120.00	-
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36,200,000,000.00	37,640,725,996.00	1,440,725,996.00
1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-
1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,000,000,000.00	1,250,000,000.00	250,000,000.00
1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	150,000,000.00	150,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Murni	Perubahan	Selisih
1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31,500,000,000.00	32,270,725,996.00	770,725,996.00
1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,350,000,000.00	2,770,000,000.00	420,000,000.00
1.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5,528,298,960.00	6,296,965,503.00	768,666,543.00
1.2.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	679,349,960.00	1,090,763,960.00	411,414,000.00
1.2.11.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150,000,000.00	150,000,000.00	-
1.2.11.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	-
1.2.11.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4,668,949,000.00	5,026,201,543.00	357,252,543.00
1.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3,205,100,000.00	2,826,790,000.00	(378,310,000.00)
1.2.12.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1,105,100,000.00	1,105,100,000.00	-
1.2.12.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2,100,000,000.00	1,721,690,000.00	(378,310,000.00)
1.2.13	Penataan Organisasi	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	-
1.2.13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	300,000,000.00	300,000,000.00	-
1.2.13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250,000,000.00	250,000,000.00	-
1.2.13.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	300,000,000.00	300,000,000.00	-
1.2.13.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	200,000,000.00	200,000,000.00	-
1.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7,004,095,000.00	7,004,095,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Murni	Perubahan	Selisih
1.2.14.1	Fasilitasi Keprotokolan	541,103,000.00	541,103,000.00	-
1.2.14.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,762,992,000.00	1,762,992,000.00	-
1.2.14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4,700,000,000.00	4,700,000,000.00	-
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	60,311,339,500.00	60,816,173,157.00	504,833,657.00
2.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	18,403,206,000.00	18,499,419,657.00	96,213,657.00
2.2.01.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	800,000,000.00	800,000,000.00	-
2.2.01.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	16,903,206,000.00	17,067,599,657.00	164,393,657.00
2.2.01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	700,000,000.00	631,820,000.00	(68,180,000.00)
2.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	38,991,172,500.00	39,399,792,500.00	408,620,000.00
2.2.02.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7,791,172,500.00	8,199,792,500.00	408,620,000.00
2.2.02.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	-
2.2.02.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	23,700,000,000.00	23,700,000,000.00	-
2.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
2.2.03.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	350,000,000.00	350,000,000.00	-
2.2.03.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	550,000,000.00	550,000,000.00	-
2.2.03.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100,000,000.00	100,000,000.00	-
2.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1,916,961,000.00	1,916,961,000.00	-
2.2.04.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1,486,961,000.00	1,486,961,000.00	-
2.2.04.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	430,000,000.00	430,000,000.00	-
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	7,521,272,000.00	6,941,794,621.00	(579,477,379.00)
3.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	800,700,000.00	1,012,582,821.00	211,882,821.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Murni	Perubahan	Selisih
3.2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	375,700,000.00	375,700,000.00	-
3.2.01.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	250,000,000.00	250,000,000.00	-
3.2.01.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	175,000,000.00	386,882,821.00	211,882,821.00
3.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4,745,572,000.00	3,954,211,800.00	(791,360,200.00)
3.2.02.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	200,000,000.00	332,755,000.00	132,755,000.00
3.2.02.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4,295,572,000.00	3,371,456,800.00	(924,115,200.00)
3.2.02.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	250,000,000.00	250,000,000.00	-
3.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,975,000,000.00	1,975,000,000.00	-
3.2.03.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	775,000,000.00	775,000,000.00	-
3.2.03.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	700,000,000.00	700,000,000.00	-
3.2.03.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	500,000,000.00	500,000,000.00	-
TOTAL		229,444,689,696.00	235,997,078,013.00	6,552,388,317.00

Sumber : Aplikasi sistem pelaporan pembangunan (Simpelbang), Database Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Januari 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Analisis Capaian IKU
3. Akuntabilitas Anggaran
4. Prestasi Organisasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, dari pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah ditetapkan, sampai pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, memiliki standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya, sehingga akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sekretariat Daerah Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan media formulir pengukuran kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu: Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) * 100\%$$

Dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Nilai
1.	>91-100	Sangat Memuaskan	AA
2.	>80-90	Memuaskan	A
3.	>70-80	Sangat Baik	BB
4.	>60-70	Baik	B
5.	>50-60	Cukup	CC

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Nilai
6.	>30-50	Kurang	C
7.	>0-30	Sangat Kurang	D

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKIP ini terlihat rumusan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi pada setiap sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan organisasi.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Bekasi tahun 2024, dimana Sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Bekasi tahun 2024 merupakan kinerja tahun pertama pada periode Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi pada tahun 2024 adalah sebesar 112,23% yang dihitung dari rata-rata

capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tujuan : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi					
1.	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Persentase Capaian IKK yang meningkat	40%	49.59%	123.97
2.	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	88	88.87	100.99
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP SETDA	A (82.04)	A (82.04)	100
		Nilai IKM SETDA	83	88.13	106.18
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	22,73	29.55	129.98

Sumber : Data Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Desember 2024.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2024-2026. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis pertama yaitu Meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi menetapkan Persentase Capaian IKK yang meningkat dengan capaian kinerja 123,97 persen (terlampai).

Untuk mencapai sasaran strategis kedua Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pelaksanaan Pembangunan dengan capaian kinerja 100,99 persen (terlampau) dan mencapai sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja, Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: *Pertama* Nilai AKIP SETDA dengan capaian kinerja 100 persen (tercapai), *kedua* Nilai IKM SETDA dengan capaian kinerja 106,18 persen dan *ketiga* Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas dengan capaian kinerja 129,98 persen hingga dapat diinterpretasikan bahwa seluruh indikator kinerja sasaran strategis setda tercapai.

Dengan melihat 5 (lima) indikator untuk mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dimana kesemua indikator mencapai target yang ditetapkan maka capaian indikator kinerja tersebut semestinya mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Sekretariat Daerah dalam Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah yang diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial

1. Indikator Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD

menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK Output (Keluaran) dan IKK Outcome (Hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian. Adapun evaluasi terhadap LPPD menghasilkan skoring yang berasal dari bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK per bidang urusan pemerintahan.

Pada tahun 2023 pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui kinerja Bagian Tata Pemerintahan dengan perolehan skor LPPD Kota Bekasi sebesar 3,1703 (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023) dari target yang ditetapkan pada RPJMD pada tahun 2023 sebesar 3,360. Sementara hasil EPPD tahun 2024 terhadap LPPD Tahun 2023 sampai saat ini belum ada.

Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang meningkat, menunjukkan kontribusi langsung perangkat daerah terhadap pencapaian target yang lebih spesifik di bidang tanggung jawabnya. Jika perangkat daerah berhasil meningkatkan capaian IKK secara signifikan, ini akan berkontribusi positif terhadap nilai EPPD. Adapun Capaian kinerja indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
 Persentase Capaian IKK yang meningkat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase Capaian IKK yang meningkat	persen	40	49,59	123,97%

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Tata Pemerintahan tahun 2024, Diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 40 Persen, sementara realisasi mencapai 49,59 Persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas Indikator Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2024 sebesar 123,97 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 telah terlampaui dengan penjelasan bahwa 60 dari total 121 IKK meningkat dari tahun sebelumnya.

Faktor penyebab utama yang mendorong keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Daerah

Kepemimpinan yang visioner dan efektif dapat menjadi kunci utama dalam pencapaian target IKK. Pemimpin yang mampu menyusun strategi yang jelas, memberikan arahan yang tepat, dan menginspirasi tim untuk bekerja secara terkoordinasi akan memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai dengan optimal.

2. Perencanaan yang Matang dan Terukur

Pencapaian IKK yang meningkat biasanya didahului dengan perencanaan yang solid. Perencanaan yang realistis, berbasis data, dan disusun dengan mempertimbangkan prioritas serta kebutuhan masyarakat atau organisasi akan mempermudah implementasi dan pemantauan capaian IKK. Penetapan indikator yang terukur dan realistis juga sangat penting dalam mencapai target tersebut.

3. Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien

Pengelolaan sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun material, yang efisien dan efektif adalah salah satu faktor penentu dalam pencapaian target IKK. Penggunaan anggaran dan sumber daya yang tepat guna dan optimal akan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki dampak yang maksimal dan mencapai hasil yang diinginkan.

4. Fokus pada Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Peningkatan kualitas layanan publik sering kali menjadi indikator kunci dalam penilaian IKK. Jika pemerintah daerah atau organisasi berhasil memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka ini akan berdampak positif pada pencapaian IKK yang lebih tinggi.

5. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah atau Organisasi

Aparatur pemerintah atau staf organisasi yang profesional, berkompeten, dan termotivasi cenderung dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penguatan kapasitas individu dalam menjalankan tugas akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan.

6. Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Efektif

Sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur dan berbasis data memungkinkan identifikasi cepat terhadap kemajuan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Dengan adanya evaluasi berkala,

langkah-langkah korektif dapat segera diambil untuk memastikan pencapaian target IKK yang lebih baik.

7. Komunikasi yang Jelas dan Terkoordinasi

Komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat, baik internal organisasi maupun dengan masyarakat dan stakeholder eksternal, sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan bersama dan peran masing-masing dalam mencapainya. Komunikasi yang baik juga mencegah kesalahan atau misinterpretasi yang dapat menghambat pencapaian target.

8. Penggunaan Teknologi yang Mendukung

Implementasi teknologi informasi yang tepat, seperti sistem manajemen yang terintegrasi atau platform pelayanan publik online, dapat mempercepat proses administratif dan meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi juga memungkinkan pemantauan capaian kinerja secara real-time, yang membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

9. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks pemerintahan, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program sangat mempengaruhi pencapaian target IKK. Partisipasi masyarakat dapat memperkuat dukungan terhadap kebijakan atau program yang dijalankan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tepat sasaran dan dapat diterima dengan baik oleh publik.

10. Keterbukaan dan Transparansi

Meningkatnya transparansi dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan informasi yang cukup tentang kebijakan, mereka cenderung lebih mendukung dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang optimal.

11. Pemanfaatan Data dan Analisis

Penggunaan data yang tepat dan analisis yang mendalam sangat penting dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan yang mendukung pencapaian target IKK. Dengan data yang akurat, kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan masalah yang dihadapi dapat diatasi dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, pencapaian target Persentase Capaian IKK yang meningkat dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor-faktor internal dan eksternal, yang berfokus pada kualitas kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, partisipasi masyarakat, serta sistem yang mendukung pelaksanaan dan pemantauan kinerja.

Pencapaian indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:

Tabel 3. 2
 Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran
 Persentase Capaian IKK yang meningkat

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase Peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	Persen	75	79,55	106,06

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Tata Pemerintahan tahun 2024, Diolah

Ketercapaian indikator program "Persentase Peningkatan Pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah" sangat berpengaruh terhadap tingkat ketercapaian indikator sasaran "Persentase Capaian IKK yang Meningkatkan" karena keduanya saling terkait dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kinerja organisasi secara keseluruhan selain itu peningkatan pemahaman IKK pada perangkat daerah memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian Persentase Capaian IKK karena pemahaman yang baik membantu perangkat daerah untuk lebih fokus, efektif, dan efisien dalam merencanakan, melaksanakan, serta

mengevaluasi program-program yang relevan dengan indikator kinerja. Dengan adanya pemahaman yang jelas, perangkat daerah akan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan koordinasi, serta mengurangi hambatan dalam mencapai target kinerja, yang pada akhirnya mendorong peningkatan capaian IKK secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ketercapaian indikator tersebut mempengaruhi tingkat ketercapaian IKK:

1. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai seberapa efektif dan efisien suatu program atau kebijakan. Jika perangkat daerah memiliki pemahaman yang baik tentang IKK dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), mereka akan lebih mampu merancang dan melaksanakan program-program yang efektif sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Pemahaman yang mendalam tentang IKK akan membantu perangkat daerah dalam memfokuskan upaya mereka pada pencapaian tujuan yang jelas dan terukur.
2. Ketika perangkat daerah memahami dengan baik tentang IKK, mereka akan lebih terarah dalam menjalankan program-program yang berhubungan dengan indikator-indikator tersebut. Hal ini memungkinkan perangkat daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan tindakan mereka dengan lebih tepat, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian target IKK.
3. Peningkatan pemahaman tentang IKK melalui pelatihan, sosialisasi, atau workshop dapat meningkatkan kapasitas SDM di tingkat perangkat daerah. SDM yang memiliki pemahaman yang lebih baik akan mampu mengimplementasikan kebijakan dan program dengan lebih baik, meningkatkan kinerja, dan pada gilirannya meningkatkan Persentase Capaian IKK. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana indikator kinerja diukur juga dapat membantu mereka dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian secara lebih akurat.

4. Pemahaman yang lebih baik tentang IKK juga dapat meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah. Setiap perangkat daerah yang terlibat dalam proses pencapaian IKK akan lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi yang baik antar unit pemerintahan akan mempercepat pencapaian target IKK karena semua pihak bekerja dengan pemahaman yang sama mengenai apa yang perlu dicapai.
5. Ketika perangkat daerah memiliki pemahaman yang baik tentang IKK, mereka akan lebih akuntabel dalam melaksanakan tugas dan program-program yang sudah ditetapkan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengukuran kinerja akan mendorong mereka untuk bertindak lebih transparan, yang pada gilirannya dapat mempercepat pencapaian target IKK karena pengelolaan yang lebih terbuka dan terukur.
6. Pemahaman yang baik tentang IKK akan membantu perangkat daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif terhadap program yang dilaksanakan. Dengan pengetahuan yang tepat tentang indikator yang digunakan untuk menilai kinerja, mereka dapat mengidentifikasi hambatan atau masalah yang muncul lebih awal dan mengambil langkah perbaikan yang cepat. Hal ini memastikan pencapaian IKK dapat lebih terjaga dan ditingkatkan.
7. Peningkatan pemahaman perangkat daerah tentang pentingnya IKK akan menumbuhkan budaya kinerja yang lebih baik dalam pemerintahan daerah. Ketika perangkat daerah memahami bahwa pencapaian IKK memiliki dampak langsung terhadap penilaian kinerja mereka dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja secara optimal. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi pencapaian Persentase Capaian IKK.
8. Tanpa pemahaman yang cukup, perangkat daerah mungkin tidak dapat melaksanakan program sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan

membuat keputusan yang keliru. Namun, dengan pemahaman yang lebih baik tentang IKK, mereka dapat menghindari kesalahan dalam implementasi program, memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat tahun 2024 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Capaian IKK yang meningkat	
		2024	Target Akhir Renstra
Target	Persen	40	40
Realisasi	Persen	49,59	-

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2024

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2024 sebesar 50% dibandingkan dengan target pada akhir renstra pada tahun 2026 sebesar 40%, maka Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Sekretariat Daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja Persentase Capaian IKK yang meningkat pada perangkat daerah dengan langkah pembinaan secara berkesinambungan dan melakukan penjagaan atas data-data capaian IKK.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Capaian IKK yang meningkat Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Sasaran	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	631.820.000	550.968.550	87,2	123,97%	36,77
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	631.820.000	550.968.550	87,2		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat, dimana pagu anggaran sebesar Rp.700.000.000,00 pada penetapan APBD TA. 2024 dan terkoreksi menjadi Rp.631.820.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.550.968.550,00, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Capaian IKK yang meningkat hanya mencapai 87,2 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Capaian IKK sebesar 49,59 persen dari target sebesar 40 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 123,97 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 36,77 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi *capaian* kinerja terlampaui.

Tabel 3. 5
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2024	2023
1	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Persen	49,59	50

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Tata Pemerintahan tahun 2024, Diolah

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan

2. Indikator Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan

Indikator sasaran strategis meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan adalah Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang diperoleh dengan formula :

$$(Realisasi\ Pelaksanaan\ Kegiatan\ x\ 80\%) + \left\{ \left[\frac{Jumlah\ Pengadaan\ Sesuai\ Ketentuan}{Jumlah\ Pengadaan\ yang\ Difasilitasi} x 40\% \right] + (Indeks\ Kepuasan\ Masyarakat\ Bagian\ PBJ) x 60\% \right\} x 20\%$$

Indikator ini merupakan gabungan persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan, persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa yang memenuhi ketentuan dan indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan ketentuan.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6
 Analisis Pencapaian Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	persen	88	88,87	100,99%

Sumber: Data Bagian Pembangunan dan Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2024 sebesar 88 persen, sementara realisasi mencapai 88,87 persen, maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang sebesar 100,99 persen, maka capaian indikator Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2024 telah terlampaui sebesar 0,99 persen dari target yang telah di tetapkan.

Dalam mengukur kinerja Pelaksanaan Pembangunan di Kota Bekasi, dihitung menggunakan beberapa komponen yaitu :

1. Komponen pembentuk Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang pertama adalah nilai kinerja pengendalian pembangunan diperoleh dari realisasi kinerja fisik perangkat daerah dimana pada tahun 2024 ini kinerja fisik perangkat daerah sebesar 96,89 persen jika dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 82,86 persen. Untuk Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7
Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2024

 PEMERINTAH KOTA BEKASI REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN OPD TAHUN ANGGARAN 2024 Periode 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024										
KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01	Dinas Pendidikan	1.900.232.696.622	1.900.232.696.622	100,00	1.673.080.633.955	88,05	100,00	99,02	-11,95	-0,98
1.02.01	Dinas Kesehatan	862.583.197.457	862.583.197.457	100,00	778.228.368.441	90,22	97,94	92,81	-9,78	-5,14
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	574.697.513.389	574.697.513.389	100,00	538.840.059.592	93,76	100,00	95,18	-6,24	-4,82
1.03.01	Dinas Tata Ruang	26.145.138.109	26.145.138.109	100,00	23.296.141.587	89,10	100,00	99,26	-10,90	-0,74
1.03.02	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	741.554.591.602	741.554.591.602	100,00	642.417.133.150	86,63	99,78	98,82	-13,37	-0,96
1.04.02	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	751.036.065.658	751.036.065.658	100,00	523.106.420.614	69,65	100,00	90,12	-30,35	-9,88
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	96.701.462.570	96.701.462.570	100,00	89.003.611.267	92,04	100,00	100,00	-7,96	0,00
1.05.02	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	86.333.256.444	86.333.256.444	100,00	73.603.548.162	85,26	100,00	99,43	-14,74	-0,57
1.06.01	Dinas Sosial	31.132.479.236	31.132.479.236	100,00	27.935.447.177	89,73	100,00	100,00	-10,27	0,00
1.06.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.954.369.380	10.954.369.380	100,00	9.593.918.422	87,58	98,83	91,69	-12,42	-7,14
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	18.508.617.440	18.508.617.440	100,00	15.450.065.461	83,47	100,00	100,00	-16,53	0,00
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	19.124.105.360	19.124.105.360	100,00	17.169.232.720	89,78	100,00	99,99	-10,22	-0,01
2.03.02	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	21.290.672.300	21.290.672.300	100,00	18.061.112.390	84,83	100,00	99,77	-15,17	-0,23
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	519.765.480.684	519.765.480.684	100,00	421.367.052.438	81,07	100,00	100,00	-18,93	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.06.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	40.173.444.790	40.173.444.790	100,00	36.526.846.261	90,92	100,00	100,00	-9,08	0,00
2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	29.539.753.800	29.539.753.800	100,00	26.585.397.545	90,00	99,83	98,65	-10,00	-1,18
2.09.01	Dinas Perhubungan	100.338.778.340	100.338.778.340	100,00	87.589.003.702	87,29	98,97	93,45	-12,71	-5,52
2.10.04	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	40.861.988.050	40.861.988.050	100,00	38.275.823.920	93,67	100,00	99,05	-6,33	-0,95
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	12.785.258.830	12.785.258.830	100,00	11.010.707.494	86,12	100,00	100,00	-13,88	0,00
2.12.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.377.658.760	34.377.658.760	100,00	31.219.950.310	90,81	100,00	99,91	-9,19	-0,09
2.13.01	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	58.925.149.045	58.925.149.045	100,00	51.207.281.644	86,90	100,00	95,29	-13,10	-4,70
2.18.02	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah	17.417.495.480	17.417.495.480	100,00	15.370.342.890	88,25	100,00	98,70	-11,75	-1,30
3.02.03	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	14.435.564.309	14.435.564.309	100,00	12.995.839.860	90,03	100,00	97,71	-9,97	-2,29
3.06.02	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	34.092.082.225	34.092.082.225	100,00	29.594.812.472	86,81	100,00	93,19	-13,19	-6,81
4.01.01	Sekretariat Daerah	235.997.078.013	235.997.078.013	100,00	203.400.576.968	86,19	99,99	95,38	-13,81	-4,61
4.02.01	Inspektorat Kota	47.244.416.279	47.244.416.279	100,00	42.234.401.899	89,40	100,00	99,19	-10,60	-0,81
4.03.02	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	32.475.464.220	32.475.464.220	100,00	29.784.439.496	91,71	99,69	99,98	-8,29	0,29
4.04.02	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	245.515.186.714	245.515.186.714	100,00	211.279.276.829	86,06	100,00	97,48	-13,94	-2,52
4.04.03	Badan Pendapatan Daerah	190.429.061.485	190.429.061.485	100,00	133.591.286.855	70,15	100,00	98,03	-29,85	-1,97
4.05.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.682.067.532	27.682.067.532	100,00	24.539.165.518	88,65	100,00	100,00	-11,35	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.08.01	Sekretariat DPRD	209.165.099.233	209.165.099.233	100,00	158.937.476.332	75,99	100,00	98,06	-24,01	-1,94
4.11.01	Kecamatan Bekasi Timur	34.253.248.360	34.253.248.360	100,00	32.888.279.942	96,02	100,00	100,00	-3,98	0,00
4.11.02	Kecamatan Bekasi Barat	35.770.436.000	35.770.436.000	100,00	34.181.662.703	95,56	100,00	100,00	-4,44	0,00
4.11.03	Kecamatan Bekasi Utara	46.754.089.520	46.754.089.520	100,00	44.704.453.656	95,62	100,00	100,00	-4,38	0,00
4.11.04	Kecamatan Bekasi Selatan	34.628.993.400	34.628.993.400	100,00	33.311.961.254	96,20	100,00	100,00	-3,80	0,00
4.11.05	Kecamatan Medansatria	28.406.593.060	28.406.593.060	100,00	27.087.527.994	95,36	100,00	100,00	-4,64	0,00
4.11.06	Kecamatan Rawalumbu	32.038.315.840	32.038.315.840	100,00	30.425.567.020	94,97	100,00	99,96	-5,03	-0,04
4.11.07	Kecamatan Bantargebang	23.459.734.760	23.459.734.760	100,00	22.297.765.191	95,05	100,00	98,30	-4,95	-1,70
4.11.08	Kecamatan Mustikajaya	29.588.120.400	29.588.120.400	100,00	28.210.400.339	95,34	100,00	100,00	-4,66	0,00
4.11.09	Kecamatan Jatiasih	37.977.665.680	37.977.665.680	100,00	36.383.479.788	95,80	100,00	100,00	-4,20	0,00
4.11.10	Kecamatan Pondokgede	32.067.107.280	32.067.107.280	100,00	30.985.100.323	96,63	100,00	99,46	-3,37	-0,54
4.11.11	Kecamatan Jatisampurna	29.164.965.600	29.164.965.600	100,00	27.781.878.566	95,26	100,00	100,00	-4,74	0,00
4.11.12	Kecamatan Pondokmelati	25.730.352.360	25.730.352.360	100,00	24.533.350.735	95,35	100,00	99,71	-4,65	-0,29
4.12.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	111.790.119.300	111.790.119.300	100,00	106.914.176.545	95,64	100,00	98,43	-4,36	-1,57
TOTAL		7.533.144.934.916	7.533.144.934.916	100,00	6.475.000.979.427	85,95	99,72	96,90	-14,05	-2,83

Sumber: Data Simpelbang, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

2. Komponen yang kedua adalah persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa yang memenuhi ketentuan, dimana dari 11498 paket pekerjaan yang terdaftar di aplikasi SIRUP pada tahun 2024 yang ada di kota Bekasi kesemuanya difasilitasi oleh bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Komponen ketiga yaitu indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan ketentuan, dimana atas dasar survey kepuasan masyarakat yang dilakukan dalam kurun waktu Januari-Desember 2024 nilai yang didapatkan oleh unit layanan Publik PBJ adalah 94,02 atau dengan kategori sangat baik.

Dari ketiga komponen tersebut didapatkan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$(96,89 \times 80\%) + \left\{ \left[\left(\frac{11498}{11498} \times 40\% \right) + (94,02) \times 60\% \right] \times 20\% \right\}$$

sehingga didapatkan hasil sebesar 88,87 persen.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (realisasi 96,89%)
Faktor utama yang berkontribusi sebesar 80% adalah persentase realisasi pelaksanaan kegiatan. Tingkat keberhasilannya dipengaruhi oleh:
 - a. Efisiensi perencanaan: kemampuan untuk menyusun program kerja yang realistis dan sesuai anggaran.
 - b. Pengelolaan waktu: ketepatan penyelesaian kegiatan sesuai jadwal.
 - c. Pengawasan dan evaluasi: adanya monitoring yang efektif untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.
2. Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Kinerja Bagian ini berkontribusi 20% yang terdiri dari dua komponen yang saling mempengaruhi:

- a. Jumlah Pengadaan Sesuai Ketentuan/Jumlah Pengadaan yang difasilitasi (realisasi 100%)
 - (1) Kepatuhan terhadap aturan: pelaksanaan pengadaan sesuai regulasi dan standar yang berlaku.
 - (2) Proses yang transparan
 - (3) Kapasitas SDM
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (realisasi 94,02)
 - (1) Kualitas layanan: cepat, akurat, dan ramah dalam memberikan layanan terkait pengadaan.
 - (2) Aksesibilitas informasi: kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait proses pengadaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
 - (3) Responsivitas: Kemampuan menangani keluhan atau masukan dari masyarakat secara cepat dan efektif.
3. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi
- Penggunaan sistem berbasis teknologi yang meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatan secara umum. Adanya sistem monitoring dan evaluasi pengadaan seperti Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Berdata (<https://pbj.bekasikota.go.id/>) digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan secara real-time.
4. Sinergi Antar Unit Kerja
- a. Koordinasi antar unit kerja: kolaborasi antara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan unit kerja lainnya
 - b. Integrasi perencanaan dan pelaksanaan: program pengadaan harus mendukung target pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Capaian kinerja sasaran pada indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Perekonomian Dan Pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama Indeks Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Pembangunan	Persen	100	100	100
2.	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100	100	100

Sumber : *Evaluasi Internal Bagian Pembangunan dan Bagian PBJ tahun 2024, Diolah*

Dengan melihat capaian indikator program rata-rata tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan. Capaian indikator sasaran Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan tahun 2024 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Pelaksanaan Pembangunan Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Capaian IKK yang meningkat	
		2024	Target Akhir Renstra
Target	Persen	88	88
Realisasi	Persen	88,87	-

Sumber: *Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2024*

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2024 sebesar 88,87 Persen dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2024 sebesar 88 persen maka dapat dikatakan target dapat terlampaui. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini bukan berarti tidak ada hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah. Faktor penghambat itu antara lain :

1. Pemahaman Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih minim, sehingga masih terdapat kekeliruan dalam input data SiRUP;
2. OPD tidak konsisten dalam melakukan revisi dokumen pengadaan apabila ada kesalahan atau kurangnya persyaratan dalam dokumen pengadaan sehingga mengakibatkan waktu pemilihan penyedia barang/jasa tidak tepat.
3. Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berimplikasi pada dibutuhkannya waktu untuk penyesuaian kebijakan serta produk hukum daerah di bidang pengadaan barang/jasa;

untuk mempertahankan capaian kinerja indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan Sekretariat Daerah mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi hambatan, diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh Bagian di Sekretariat Daerah memiliki indikator program yang harus tercapai dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kinerjanya maksimal;
- b. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya;
- c. Adanya aplikasi SIMPELBANG yang mempermudah dalam mengumpulkan dan merekap data realisasi pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait pengisian data RUP baik melalui rapat virtual maupun dengan pendampingan langsung. Hal ini dilakukan agar memudahkan OPD dalam melakukan entri data RUP pada SiRUP;
- e. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat adanya perubahan peraturan pengadaan barang/jasa maka Pokja melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian terkait agar memiliki

- pedoman atau panduan dalam mengambil keputusan terkait proses pengadaan barang/jasa;
- f. Melakukan koordinasi secara intensif ke OPD terkait kelengkapan dokumen pengadaan agar segera ditindaklanjuti.
 - g. Memperkuat SDM di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bekasi dengan penambahan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam Analisis Jabatan dan Beban kerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.929.211.800	5.351.330.692	90,25	100,99	10,74
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3.954.211.800	3.527.336.732	89,2		
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	332.755.000	259.132.760	77,87		
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3.371.456.800	3.033.119.808	89,96		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	250.000.000	235.084.164	94,03		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.975.000.000	1,823.993.960	92,35		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	775.000.000	702.231.865	90,61		
		Pengelolaan Layanan	700.000.000	622.490.345	88,93		

No	Indikator Sasaran	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
		Pengadaan secara Elektronik					
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	500.000.000	499.271.750	99,85		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan, dimana pagu anggaran sebesar Rp.5.929.211.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.351.330.692,00, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang mencapai 100,99 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan sebesar 88,87 persen dari target nilai sebesar 88 poin, atau dengan capaian kinerja sebesar 100,99 persen, sementara serapan anggaran hanya sebesar 90,25 Persen, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 10,74 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran yang cukup besar, tetapi *capaian* kinerja dapat melampaui target.

Tabel 3. 11

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2024	2023
1	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Persen	88,87	89,414

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Tata Pemerintahan tahun 2024, Diolah

Capaian indikator kinerja sasaran Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan tahun 2024 sebesar 88,87 mengalami penurunan tingkat realisasi sebesar 0.54 poin dari tahun 2023.

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

3. Indikator Sasaran Nilai AKIP SETDA.

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja, karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu entry point utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka

mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai mana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Evaluasi AKIP dilakukan dengan tujuan:

- a. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- b. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- c. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bekasi menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Bekasi memperoleh nilai 82,04 atau predikat “A” dengan intreprtasi Memuaskan. Tabel hasil evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 di tunjukan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 13
Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun 2023	
		Bobot (%)	Nilai (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	24,21
2	Pengkuran Kinerja	30	24,47
3	Pelaporan Kinerja	15	12,07
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,29
	Nilai Hasil Evaluasi	100	82,04
	Tingkat Akuntabilitas		A

Sumber : LHE SAKIP Sekretariat Daerah, Tahun 2024

Adapun capaian indikator Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "A" Ke atas) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 14
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP SETDA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A	A	100%

Sumber : LHE SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar nilai A, sementara realisasi mencapai nilai A maka capaian kinerja tahun 2024 atas Nilai AKIP SETDA sebesar 100 persen, maka capaian Nilai AKIP SETDA pada Tahun 2024 telah tercapai.

Adapun sebagai perbandingan, berikut perolehan Nilai AKIP Perangkat Daerah se-Kota Bekasi Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 15
Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024
Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi

No	Perangkat Daerah	Hasil	
		Nilai	Tingkat Akuntabilitas
1	BAPPELITBANGDA	85,02	A
2	DPMPTSP	84,97	A
3	RSUD	84,58	A
4	INSPEKTORAT	84,57	A
5	SETDA	82,04	A
6	DISDUKCAPIL	81,59	A
7	BPKAD	81,43	A
8	BKPSDM	81,02	A
9	DINKES	80,67	A
10	DISKOMINFOSTANDI	80,67	A
11	DP3A	80,35	A
12	DISHUB	80,03	A
13	DISDAGPERIN	80,03	A
14	DBMSDA	79,94	BB
15	DKPPP	79,48	BB
16	DISTARU	78,92	BB
17	KEC.MEDANSATRIA	78,90	BB
18	DINAS LH	78,56	BB

No	Perangkat Daerah	Hasil	
		Nilai	Tingkat Akuntabilitas
19	DISDAMKARMAT	78,33	BB
20	DISKOPUKM	78,18	BB
21	BAPENDA	78,07	BB
22	KEC. RAWALUMBU	77,90	BB
23	DINSOS	77,29	BB
24	KEC.PONDOKGEDE	77,14	BB
25	BAKESBANGPOL	76,72	BB
26	KEC.BEKASI TIMUR	76,55	BB
27	KEC.JATISAMPURNA	75,57	BB
28	KEC. BEKASI SELATAN	75,16	BB
29	KEC. PONDOKMELATI	75,14	BB
30	KEC.BANTARGEBAH	74,78	BB
31	DPPKB	74,53	BB
32	DISPORA	74,51	BB
33	KEC.MUSTIKAJAYA	74,04	BB
34	KEC. BEKASI UTARA	72,74	BB
35	DISPARBUD	70,03	BB
36	DISARPUSDA	69,89	B
37	SETWAN	69,62	B
38	DISPERKIMTAN	69,25	B
39	SATPOL PP	64,26	B
40	KEC. BEKASI BARAT	62,81	B
41	DISNAKER	61,63	B
42	KEC.JATIASEH	60,23	B
43	BPBD	60,10	B
44	DISDIK	60,05	B

Sumber : Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 000.8.6.3/Kep.376-Org/VIII/2024

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Nilai AKIP SETDA ini dikarenakan Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan crosscutting kinerja Untuk memastikan kolaborasi kinerja antara Sekretariat Daerah dengan perangkat-perangkat daerah terkait.

- b. Menyempurnakan Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki cascade kinerja mulai organisasi hingga individu;
- c. Menyempurnakan Indikator Kinerja Individu serta sistem pengukuran kinerja individu;
- d. Memanfaatkan integrasi sistem Perencanaan Kinerja , Penganggaran dan Sistem Informasi Kinerja (e-performance based budgeting);
- e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;
- f. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA sehingga dapat mencapai target karena didukung oleh indikator capaian program sebagai berikut:

Tabel 3. 16
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran
Nilai AKIP SETDA

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	Persen	75	100	133,33%
2.	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persen	100	100	100%
3.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	Persen	100	100	100%

Sumber : *Evaluasi Internal Bagian Organisasi, Tata Usaha dan Pembangunan tahun 2024, Diolah*

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA didukung oleh 3 (tiga) indikator program dengan rata-rata capaian program sebesar 111,11 persen maka keberhasilan ini maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA. Capaian indikator sasaran

Nilai AKIP SETDA jika dikaitkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 17
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Capaian IKK yang meningkat	
		2024	Target Akhir Renstra
Target	Persen	A	A
Realisasi	Persen	100	-

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2024

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Nilai AKIP SETDA pada tahun 2024 sudah tercapai sebesar 100 persen jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu nilai A, maka kedepan Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menetapkan terget kinerja yang sepenuhnya didasarkan atas basis data yang memadai dan dilengkapi dengan argument dan perhitungan logis;
2. Menyusun strategi untuk pencapaian kinerja yang telah di tetapkan agar pencapaian kinerja dapat meningkat;
3. Memanfaatkan rencana aksi dalam pengarahsan dan pengorganisasian kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah di perjanjikan;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi internal, baik pada setiap level dengan melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terkait capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi;
5. Dimanfaatkannya informasi dalam laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta penyesuaian anggaran.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung

pencapaian Indikator kinerja sasaran Nilai AKIP SETDA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 18
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Nilai AKIP SETDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.284.000.000,00	1.185.506.260,00	92,33	100	9,23
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	200.000.000,00	184.400.170,00	92,2		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	184.000.000,00	176.397.000,00	95,87		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	50.000.000,00	46.790.500,00	93,58		
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	300.000.000,00	269.081.615,00	89,69		
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250.000.000,00	239.496.600,00	95,8		
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	300.000.000,00	269.340.375,00	89,78		
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.954.211.800,00	3.527.336.732,00	89,2		
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	332.755.000,00	259.132.760,00	77,87		
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3.371.456.800,00	3.033.119.808,00	89,96		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	250.000.000,00	235.084.164,00	94,03		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 program dan 9 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 5.238.211.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.712.842.992,00, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai AKIP SETDA mencapai 90,77 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Nilai AKIP SETDA yaitu nilai A dari target nilai A, atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,23 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi *capaian* kinerja tercapai dan ini dapat juga diartikan bahwa Sekretariat Daerah dapat meningkatkan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 3. 12
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2024	2023
1	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A	A

Sumber : Data LHE Inspektorat Terhadap SAKIP Sekretariat Daerah tahun 2024, Diolah

4. Indikator Sasaran Nilai IKM SETDA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai upaya untuk membangun sistem pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat menjadi penting seiring dengan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pelibatan masyarakat juga dapat mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.

Untuk mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut, disusun Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang

diberikan. Penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan sembilan unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana dan prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Dalam rangka mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai salah satu penyedia layanan publik di Pemerintah Kota Bekasi, perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat mengenai penilaian pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dilakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat. Hasil dari survei kepuasan masyarakat ini merangkum data dan informasi yang berguna untuk evaluasi lebih lanjut tentang tingkat kepuasan masyarakat. tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Nilai IKM SETDA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai IKM SETDA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	83	88.13	106.18%

Sumber: Laporan Pelaksanaan SKM Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Triwulan IV, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target Nilai IKM SETDA pada tahun 2024 sebesar 83 poin, sementara realisasi mencapai 88,13 poin, maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Nilai IKM SETDA yang sebesar 106,18 persen, maka capaian indikator Nilai IKM SETDA pada Tahun 2024 telah terlampaui.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. Pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2024

terhadap 12 Unit layanan publik dan 31 unsur pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat nilai hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2023 pada tabel berikut:

Tabel 3. 141
Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada
Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2024

No	Unit Penyelenggara Pelayanan	Nilai IKM SMT1	Nilai IKM TW III	Nilai IKM TW IV	Nilai Rata-Rata IKM SM II	Nilai Rata-Rata IKM Tahun 2024	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	Sekretariat Daerah	88,83	87,86	86,98	87,42	88,13	B	Baik

Sumber : Keputusan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Nomor 000.8.3.4/Kep.78-Setda.Org/XII/2024

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 3. 1
Grafik Perkembangan Nilai SKM Sekretariat Daerah



Sumber : Laporan SKM Sekretariat Daerah tahun 2020-2024, Diolah

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Keterampilan dan Profesionalisme Petugas: Kualitas dan kompetensi petugas yang melayani masyarakat sangat mempengaruhi tingkat kepuasan. Petugas yang ramah, terlatih, dan responsif dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
2. Kecepatan dan Ketepatan Layanan: Pelayanan yang cepat dan tepat waktu, terutama dalam hal administrasi atau kebutuhan masyarakat lainnya, akan membuat masyarakat merasa puas dan lebih percaya pada pelayanan yang diberikan.
3. Kemudahan Akses Layanan: Layanan yang mudah diakses oleh masyarakat, baik secara fisik maupun digital (misalnya aplikasi layanan online), mempermudah masyarakat dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
4. Transparansi dalam Proses Pelayanan: Masyarakat cenderung lebih puas ketika mereka tahu proses pelayanan yang diberikan, baik itu terkait biaya, waktu, dan prosedur. Kejelasan informasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau penyedia layanan.
5. Pelaporan yang Terbuka: Transparansi dalam pelaporan hasil kinerja, penggunaan anggaran, dan kebijakan publik lainnya juga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, karena mereka merasa dilibatkan dan diberi informasi yang memadai.
6. Fasilitas yang Memadai: Fasilitas yang memadai, baik itu ruang tunggu yang nyaman, alat bantu yang tepat, atau sistem yang efisien, meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan layanan.
7. Infrastruktur Pendukung: Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi, konektivitas internet, dan keberadaan fasilitas umum yang

mudah diakses, juga sangat mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

8. Pemberian Informasi yang Jelas dan Tepat Waktu: Komunikasi yang jelas, baik melalui media sosial, situs web, maupun pemberitahuan langsung, dapat membantu masyarakat untuk memahami prosedur layanan, status permohonan, dan kebijakan terbaru.
9. Respon Cepat terhadap Keluhan: Adanya mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan dan masukan masyarakat, serta respon yang cepat dan solutif, akan meningkatkan tingkat kepuasan mereka.
10. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Penyedia layanan yang memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai akan berpengaruh besar terhadap kualitas pelayanan.
11. Motivasi dan Kepuasan Kerja Pegawai: Pegawai yang termotivasi untuk bekerja dengan baik dan merasa dihargai oleh organisasi cenderung memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
12. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat: Melakukan survei atau wawancara untuk memahami harapan dan kebutuhan masyarakat memungkinkan institusi untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan keinginan masyarakat.
13. Adaptasi terhadap Perubahan: Mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat, seperti melalui teknologi atau cara baru dalam memberikan pelayanan, akan meningkatkan kepuasan.
14. Konsistensi dalam Kualitas Layanan: Masyarakat akan lebih puas jika mereka mendapatkan pelayanan yang konsisten, tanpa ada penurunan kualitas layanan dari waktu ke waktu.
15. Mekanisme Pengawasan yang Baik: Pengawasan terhadap penyedia layanan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas

yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

16. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi terhadap efektivitas layanan secara berkala dan melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi akan memastikan bahwa layanan tetap relevan dan memadai.
17. Pemanfaatan Teknologi untuk Pelayanan: Penggunaan aplikasi, platform online, atau sistem digital lainnya untuk mempermudah akses masyarakat ke layanan dapat meningkatkan tingkat kepuasan.
18. Inovasi Layanan: Layanan yang inovatif, seperti penggunaan chatbot untuk melayani keluhan atau aplikasi mobile untuk pemantauan status pelayanan, dapat meningkatkan pengalaman masyarakat.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Nilai IKM SETDA pada Sekretariat Daerah, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 15
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama
Nilai IKM SETDA

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persen	100	100	100
2.	Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Persen	100	100	100
3.	Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	Persen	100	100	100
4.	Persentase Fasilitas kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya	Persen	100	100	100
5.	Persentase fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100	100	100

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, Diolah

Dengan melihat tingkat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Nilai IKM SETDA. Capaian indikator sasaran Nilai IKM SETDA tahun 2024 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 16
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai IKM SETDA Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Capaian IKK yang meningkat	
		2024	Target Akhir Renstra
Target	Persen	83	83
Realisasi	Persen	88.13	-

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2024

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Nilai IKM SETDA pada tahun 2024 sebesar 88,13 poin dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 sebesar 83 poin, maka Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Sekretariat Daerah untuk mempertahankan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

1. Melakukan evaluasi mendalam terhadap hasil survei IKM sebelumnya untuk mengidentifikasi area yang sudah baik dan yang masih perlu perbaikan. Menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat, baik itu positif maupun negatif.
2. Berdasarkan analisis, Setda harus menetapkan prioritas untuk aspek-aspek layanan yang perlu diperbaiki atau dipertahankan untuk memastikan tingkat kepuasan tetap tinggi.
3. Menjaga dan terus meningkatkan kualitas layanan publik, baik dalam hal kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kemudahan akses. Pengembangan sistem layanan berbasis digital sehingga dapat mempermudah akses masyarakat.

4. Secara berkala mengidentifikasi dan merumuskan kembali proses layanan untuk meminimalkan birokrasi yang berbelit-belit serta mempercepat waktu tunggu, yang sering kali menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat.
5. Mengadakan forum komunikasi secara rutin antara pemerintah dan masyarakat untuk mendengar langsung aspirasi dan keluhan, serta menjelaskan kebijakan yang dijalankan. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka atau melalui platform digital.
6. Selain survei IKM tahunan, Setda bisa melakukan survei atau polling singkat secara berkala untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap layanan yang sedang berjalan.
7. Mengembangkan layanan yang lebih inovatif, seperti layanan berbasis aplikasi untuk pengaduan, pengajuan izin, atau informasi layanan publik lainnya.
8. Mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang menyebabkan ketidakpuasan dan membuat program perbaikan yang konkret dan terukur untuk menanggulangi masalah tersebut.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai IKM SETDA Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 24
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Nilai IKM SETDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.284.000.000,00	1.185.506.260,00	92,33	106,18	9,94
		Penyusunan Dokumen	184,000,000.00	176,397,000.00	95.87		

No	Indikator Sasaran	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
		Perencanaan Perangkat Daerah					
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250,000,000.00	239,496,600.00	95,8		
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4,700,000,000.00	4,312,113,872.00	91.75		
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Masyarakat	300.000.000,00	269.081.615,00	89,69		
		Fasilitasi Bantuan Hukum	550,000,000.00	403,397,838.00	73.35		
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100,000,000.00	38,179,290.00	38.18		
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8,199,792,500.00	7,433,580,360.00	90.66		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	7,500,000,000.00	7,266,651,400.00	96.89		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	23,700,000,000.00	23,693,222,362.00	99.97		
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,975,000,000.00	1,823,993,960.00	92.35		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	775,000,000.00	702,231,865.00	90.61		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	700,000,000.00	622,490,345.00	88.93		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	500,000,000.00	499,271,750.00	99.85		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 program dan 11 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai IKM SETDA, dimana pagu anggaran sebesar Rp.47,158,792,500.00 dengan realisasi sebesar Rp. 45,387,032,682.00, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai IKM mencapai 96,24 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Nilai IKM sebesar 88,13 poin dari target nilai sebesar 83 poin, atau dengan capaian kinerja sebesar 106,13 persen, sementara serapan anggaran hanya sebesar 96,24 Persen, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 9,94 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran yang cukup besar, tetapi *capaian* kinerja dapat melampaui target.

Tabel 3. 25

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Nilai IKM SETDA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2024	2023
1	Nilai IKM Setda	Nilai	88,13	87,70

Sumber : Laporan SKM Sekretariat Daerah tahun 2023 dan 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja sasaran Nilai IKM SETDA terdapat kenaikan capaian kinerja dari 87,70 pada tahun 2023 menjadi 88,13 pada tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar 0,43. Indikator kinerja sasaran Nilai IKM SETDA dijadikan indikator kinerja sasaran karena untuk mendongkrak menerapkan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah untuk mencapai kinerja penerapan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3. 26

Perbandingan IKM Setda dengan OPD lain

No	Unit Penyelenggara Pelayanan	Nilai Rata-Rata IKM Tahun 2024	Mutu Pelayanan
1	Sekretariat Daerah	88,13	Baik
2	Sekretariat DPRD	97,18	Sangat Baik
3	Inspektorat Daerah	82.64	Baik
4	Badan Pendapatan Daerah	86.65	Baik
5	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	80.50	Baik
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	88.80	Baik
7	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	87.75	Baik
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	83.77	Baik
9	Dinas Pendidikan	84.51	Baik
10	Dinas Kesehatan	87.46	Baik

No	Unit Penyelenggara Pelayanan	Nilai Rata-Rata IKM Tahun 2024	Mutu Pelayanan
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88.01	Baik
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94.23	Baik
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	83.67	Baik
14	Dinas Lingkungan Hidup	90.27	Baik
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	98.27	Baik
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84.31	Sangat Baik
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87.27	Sangat Baik
18	Dinas Tenaga Kerja	86.00	Sangat Baik
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	93.13	Sangat Baik
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93.71	Sangat Baik
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	89.22	Sangat Baik
22	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	95.56	Sangat Baik
23	Dinas Tata Ruang	82.15	Baik
24	Dinas Perhubungan	84.36	Baik
25	Dinas Pemadam Kebakaran	93.03	Sangat Baik
26	Dinas Sosial	92.06	Baik
27	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	86.13	Baik
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	82.10	Baik
29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	90.77	Sangat Baik
30	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid	86.01	Baik
31	Satuan Polisi Pamong Praja	89.42	Baik
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.92	Sangat Baik
33	Kecamatan Bekasi Barat	85.02	Baik
34	Kecamatan Bekasi Selatan	82.10	Baik
35	Kecamatan Bekasi Utara	84.30	Baik
36	Kecamatan Bekasi Timur	86.85	Baik
37	Kecamatan Medansatria	84.85	Baik
38	Kecamatan Mustikajaya	88.79	Baik
39	Kecamatan Rawalumbu	88.22	Baik
40	Kecamatan Bantargebang	90.14	Sangat Baik
41	Kecamatan Jatisampurna	88.22	Baik
42	Kecamatan Jatiasih	90.14	Sangat Baik
43	Kecamatan Pondokmelati	84.94	Sangat Baik
44	Kecamatan Pondokgede	85.53	Sangat Baik

No	Unit Penyelenggara Pelayanan	Nilai Rata-Rata IKM Tahun 2024	Mutu Pelayanan
45	RSUD Kelas D Jatisampurna	88.13	Baik
46	RSUD Kelas D Bantargebang	82.13	Sangat Baik
47	RSUD Kelas D Pondokgede	87.59	Baik
48	RSUD Kelas D Teluk Pucung	98.67	Sangat Baik
49	Puskesmas Seroja	90.54	Sangat Baik
50	Puskesmas Kaliabang Tengah	86.18	Baik
51	Puskesmas Teluk Pucung	87.74	Kurang Baik
52	Puskesmas Pejuang	85.30	Baik
53	Puskesmas Kotabaru	88.47	Baik
54	Puskesmas Bintara	86.55	Baik
55	Puskesmas Bintarajaya	80.72	Baik
56	Puskesmas Kranji	86.15	Baik
57	Puskesmas Rawatembaga	87.54	Baik
58	Puskesmas Margamulya	84.55	Baik
59	Puskesmas Margajaya	92.65	Sangat Baik
60	Puskesmas Pekayonjaya	89.51	Baik
61	Puskesmas Jakamulya	93.13	Baik
62	Puskesmas Karangkitri	91.10	Baik
63	Puskesmas Bojong Rawalumbu	90.70	Baik
64	Puskesmas Pengasinan	93.89	Sangat Baik
65	Puskesmas Arenjaya	89.74	Sangat Baik
66	Puskesmas Bekasi Jaya	80.50	Baik
67	Puskesmas Pondokgede	91.66	Baik
68	Puskesmas Jatirahayu	87.28	Baik
69	Puskesmas Jatiwarna	86.69	Baik
70	Puskesmas Jatimakmur	86.79	Sangat Baik
71	Puskesmas Jatibening	86.35	Baik
72	Puskesmas Jatisampurna	84.66	Sangat Baik
73	Puskesmas Jatiasih	90.48	Baik
74	Puskesmas Jatiluhur	84.86	Baik
75	Puskesmas Bantargebang	88.00	Baik
76	Puskesmas Bojongmenteng	90.83	Sangat Baik
77	Puskesmas Durenjaya	90.27	Sangat Baik
78	Puskesmas Mustikajaya	91.60	Sangat Baik
79	Puskesmas Harapan Baru	90.30	Sangat Baik
80	Puskesmas Padurenan	96.64	Sangat Baik
81	Puskesmas Perwira	93.28	Sangat Baik
82	Puskesmas Jatiranggon	90.99	Sangat Baik
83	Puskesmas Cimuning	83.72	Baik

No	Unit Penyelenggara Pelayanan	Nilai Rata-Rata IKM Tahun 2024	Mutu Pelayanan
84	Puskesmas Kalibaru	87.37	Baik
85	Puskesmas Jakasetia	88.23	Baik
86	Puskesmas Perumnas II	88.70	Sangat Baik
87	Puskesmas Sumurbatu	93.23	Sangat Baik
88	Puskesmas Mustikasari	80,96	Baik
89	Puskesmas Ciketing Udik	85.34	Baik
90	Puskesmas Jatibening Baru	83.89	Baik
91	Puskesmas Harapan Mulya	87.30	Baik
92	Puskesmas Jatikramat	85.97	Baik
93	Puskesmas Medansatria	87.07	Baik
94	Puskesmas Jatimekar	88.34	Sangat Baik
95	Puskesmas Jatikarya	89.96	Sangat Baik
96	Puskesmas Cikiwul	94.22	Sangat Baik
Nilai rata-rata capaian IKM Kota Bekasi		88,02	Baik

5. Indikator Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

Indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah untuk mencapai Sasaran strategis RPD 2024-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah, karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai kualitas manajemen dan kinerja pemerintah atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment). Untuk mengukur peningkatan kualitas manajemen yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu entry point utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Untuk mencapai indikator Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah Maka Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah melakukan pembinaan terhadap penyusunan dokumen SAKIP perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan.

Adapun capaian indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas diukur dari perbandingan antara perangkat daerah dengan nilai AKIP A dengan nilai AKIP seluruh perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 27
 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	persen	22,73	29,55%	129,98%

Sumber : Bagian Organisasi Tahun 2024, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 22,73 Persen, sementara realisasi mencapai 22,95 persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas Persentase Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sebesar 129,98 persen atau melebihi target yang ditetapkan.

Adapun rekapitulasi perbandingan perolehan Nilai AKIP Perangkat Daerah se-Kota Bekasi Tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 28
 Rekapitulasi Perbandingan Hasil Evaluasi AKIP

No	Perangkat Daerah	2021		2022		2023		2024	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	RSUD	84,51	A	84,53	A	84,56	A	84,58	A
2	DPMPSTP	84,47	A	84,60	A	84,57	A	84,97	A
3	INSPEKTORAT	84,32	A	84,36	A	84,40	A	84,57	A
4	BPKAD	84,13	A	84,21	A	81,43	A	81,43	A
5	BAPPELITBANGDA	81,94	A	82,16	A	82,16	A	85,02	A
6	DINKES	80,64	A	80,65	A	80,70	A	80,67	A
7	SETDA	80,30	A	80,42	A	81,85	A	82,04	A
8	BKPSDM	80,04	A	80,16	A	80,48	A	81,02	A
9	DISTARU	79,75	BB	80,43	A	72,83	BB	78,92	BB
10	SATPOL PP	79,15	BB	80,07	A	70,43	BB	64,26	B
11	DISDUKCAPIL	78,69	BB	80,16	A	80,97	A	81,59	A
12	DBMSDA	79,90	BB	79,93	BB	79,92	BB	79,94	BB
13	DISPERKIMTAN	79,23	BB	79,28	BB	57,19	CC	69,25	B
14	DISARPUSDA	79,17	BB	79,88	BB	55,38	CC	69,89	B
15	BAPENDA	78,40	BB	78,46	BB	79,10	BB	78,07	BB
16	DISHUB	78,19	BB	78,26	BB	78,41	BB	80,03	A
17	DINAS LH	77,87	BB	78,12	BB	78,14	BB	78,56	BB
18	KEC.JATIASIH	77,18	BB	77,64	BB	56,55	CC	60,23	B
19	DINSOS	77,10	BB	77,23	BB	77,26	BB	77,29	BB
20	DISDIK	76,46	BB	76,48	BB	60,06	B	60,05	B
21	DISKOMINFOSTANDI	76,06	BB	76,12	BB	79,04	BB	80,67	A
22	KEC. BEKASI SELATAN	76,03	BB	76,42	BB	75,07	BB	75,16	BB
23	KEC.MEDANSATRIA	75,99	BB	77,05	BB	77,39	BB	78,90	BB
24	DISKOPUKM	75,48	BB	75,60	BB	76,01	BB	78,18	BB
25	DP3A	75,37	BB	76,41	BB	76,99	BB	80,35	A
26	KEC.JATISAMPURNA	74,01	BB	75,42	BB	75,57	BB	75,57	BB
27	KEC. RAWALUMBU	75,36	BB	75,38	BB	75,95	BB	77,90	BB
28	KEC.PONDOKGEDE	75,21	BB	75,43	BB	75,52	BB	77,14	BB
29	DISPARBUD	75,18	BB	75,24	BB	67,78	B	70,03	BB
30	KEC. PONDOKMELATI	75,07	BB	75,09	BB	75,14	BB	75,14	BB
31	DISPORA	75,06	BB	75,24	BB	75,35	BB	74,51	BB
32	KEC.MUSTIKAJAYA	75,03	BB	76,78	BB	68,81	B	74,04	BB

No	Perangkat Daerah	2021		2022		2023		2024	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
33	DPPKB	74,93	BB	75,01	BB	72,06	BB	74,53	BB
34	BADAN KESBANGPOL	74,81	BB	74,15	BB	75,14	BB	76,72	BB
35	DINAS DAMKAR	74,25	BB	76,13	BB	77,11	BB	78,33	BB
36	KEC. BEKASI UTARA	74,11	BB	72,20	BB	72,75	BB	72,74	BB
37	KEC.BEKASI TIMUR	74,11	BB	74,56	BB	75,09	BB	76,55	BB
38	KEC. BEKASI BARAT	73,36	BB	73,38	BB	63,41	B	62,81	B
39	DKPPP	73,34	BB	74,68	BB	78,14	BB	79,48	BB
40	KEC.BANTARGEBAWANG	74,07	BB	74,15	BB	74,50	BB	74,78	BB
41	DISDAGPERIN	71,86	BB	72,25	BB	78,84	BB	80,03	A
42	SETWAN	69,56	B	70,08	B	63,38	B	69,62	B
43	DISNAKER	62,48	B	64,17	B	51,68	CC	61,63	B
44	BPBD	42,39	C	51,89	CC	60,06	B	60,10	B

Sumber : Data LHE Inspektorat Terhadap SAKIP Perangkat Daerah tahun 2021-2024, Diolah

Dengan melihat tabel di atas, yang menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas pada tahun 2024 ini jumlahnya meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 terdapat 9 dari 44 perangkat daerah yang mendapatkan nilai AKIP A sedangkan pada tahun 2024 terdapat 13 dari 44 perangkat daerah dengan nilai AKIP A atau meningkat sebesar 9,10%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja perlu diambil langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh Sekretariat Daerah antara lain:

- a. Pemerintah Kota Bekasi agar menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.
- b. Mereviu dokumen perencanaan, serta melakukan perbaikan atas perumusan indikator kinerja agar lebih dapat menggambarkan kinerja

(outcome) yang diharapkan, sesuai level jabatan dan memenuhi kriteria SMART;

- c. Mereviu keselarasan antar kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan;
- d. Merumuskan program prioritas daerah untuk menyelesaikan isu strategis daerah dengan mengoptimalkan kolaborasi antar daerah;
- e. Mereviu peta proses bisnis dengan membangun struktur kinerja yang sesuai dengan pencapaian kinerja yang diharapkan untuk memastikan kerangka logis pencapaian kinerja telah dijabarkan dengan baik dan setiap pengampu kinerja mendapatkan kinerja yang sesuai;
- f. Melaksanakan reviu kinerja secara berjenjang pada tingkatan organisasi maupun individu melalui aplikasi kinerja yang telah dibangun agar tercipta budaya kinerja yang solid pada setiap level;
- g. Penguatan sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan sistem informasi yang mendukung pengukuran kinerja seperti e-SAKIP;
- h. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;
- i. Pemberian *reward and punishment* kepada perangkat daerah dengan kinerja baik;
- j. Menjadikan perbaikan implemintasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas yang melampaui target karena didukung oleh

indikator capaian program pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 3. 29

Indikator capaian program pendukung indikator kinerja sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	Persen	75%	100%	133,33%

Sumber: *Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, Diolah*

Ketercapaian atas indikator program Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sebagaimana tabel diatas, dimana capaian kinerja tahun 2024 terlampaui sebesar 133,33 persen. Hal ini berarti seluruh perangkat daerah telah berhasil meningkatkan pemahaman SAKIP mereka dan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan sudah efektif. Capaian indikator kinerja program Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah diformulasikan dengan membandingkan jumlah perangkat daerah yang memiliki pemahaman SAKIP dengan jumlah seluruh perangkat daerah. Ketercapaian ini berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas. Ketercapaian atas indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas ini juga akan mendorong kepada peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seperti yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3. 17

Perkembangan Nilai AKIP Kota Bekasi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai AKIP Kota Bekasi	66,28	67,07	65,48	67,10	67,33

Sumber : Hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2020-2024 Kemenpan RB

dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam dua tahun terakhir Kota Bekasi terus berupaya untuk meningkatkan nilai AKIP setelah mengalami penurunan pada tahun 2022, kami optimis bahwa nilai AKIP Kota Bekasi

tahun-tahun selanjutnya akan mendapatkan peningkatan dikarenakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mendorong perubahan mindset seluruh level pimpinan Pemda, bahwa: Nilai Evaluasi SAKIP merupakan tanggung jawab seluruh unsur pemerintah daerah, bukan hanya tanggung jawab unit yang menyusun LKIP saja;
2. Dilakukan reviu Cascade Indikator Kinerja Individu dimana dipetakan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab eselon II, III, IV dan Pelaksana, dimana indikator kinerja individu tersebut di sinkronkan dengan sasaran kinerja pegawai dan menjadi ukuran dalam penilaian prestasi kerja pegawai. Dengan demikian setiap individu pegawai memiliki kontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
3. Mereviu peta proses bisnis untuk kemudian melakukan integrasi proses bisnis dengan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah Kota Bekasi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;
5. Pemerintah Kota Bekasi telah mengintegrasikan 6 (enam) Aplikasi kinerja yang terdiri dari SIENCANG (Perencanaan/Bappelitbangda), SIMDA (Keuangan/BPKAD), e-MONEV (Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan/ Bappelitbangda), SIMPELBANG (Monev Tepra/ Bagian

Pembangunan SETDA), e-SAKIP (SAKIP/ Bagian Tata Pemerintahan SETDA) dan SIKERJA (Kinerja Harian Pegawai/ BKPSDM) dimana keenam aplikasi tersebut akan mempermudah perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi kinerja perangkat daerah dan individu pegawai dalam mencapai indikator RPJMD dan Renstra.

6. Meningkatkan kualitas evaluasi internal, baik pada level Perangkat Daerah, level Inspektorat Daerah hingga Bappelitbangda. Pada level Perangkat Daerah dikembangkan budaya kontrol tiap level dengan melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terkait capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi. Pada level Inspektorat titik berat evaluasi bukan hanya pada aspek asses tetapi lebih kepada asist agar kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah menjadi lebih baik lagi. Pada level Bappelitbangda pola perencanaan bukan hanya didasarkan pada tahapan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, tetapi juga memperhatikan capaian kinerja sesuai dengan laporan kinerja yang telah dibuat perangkat daerah dan memperhatikan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh Inspektorat.

Capaian Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas tahun 2024 bila dikaitkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 18
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Capaian IKK yang meningkat	
		2024	Target Akhir Renstra
Target	Persen	22,73	22,73
Realisasi	Persen	29,55	-

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2024

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas pada tahun 2024 tercapai sebesar 29,55 persen jika dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2024 sebesar 22,73 persen, maka kedepan Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus mempertahankan capaian kinerja dan memastikan upaya yang dilakukan tetap konsisten di tahun-tahun berikutnya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 19

Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

No	Indikator Sasaran	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000	184.400.170	92,20	100,00	7,8
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	200,000,000	184.400.170	92,20		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 184.400.170 Seratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu serratus tujuh puluh rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas mencapai 92,20 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sebesar 29,55 persen dari target sebesar 22,73 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 100,00 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan masih efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,8 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi *capaian* kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Sekretariat Daerah dapat meningkatkan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 3. 20
 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan tahun 2024 Untuk untuk Indikator Kinerja Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2024	2023
1	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Persen	20,45	29,55

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda tahun 2023-2024, diolah

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada Anggaran tahun 2024 sebelum perubahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 203.407.354.606,00 yang kemudian terkoreksi pada penetapan APBD Perubahan Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 235.997.078.013,00 yang dijabarkan dalam 3 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 34
 Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi
 Per Program Tahun 2024

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	161,612,078,196.00	168,239,110,235.00

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	60,311,339,500.00	60,816,173,157.00
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	7,521,272,000.00	6,941,794,621.00
	TOTAL	229,444,689,696.00	235,997,078,013.00

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIPD Kemendagri tahun 2024

realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 203,400,576,968.00 (89,19%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 35
Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	168,239,110,235	139.391.896.264	82,85%
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	60,816,173,157	57.855.265.044	95,13%
3.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	6,941,794,621	6.153.415.660	88,64%
	Total	235,997,078,013	203.400.576.968	86,19%

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi <https://simplerbang.bekasikota.go.id/> tahun 2024

Penyerapan anggaran sebesar 86,19% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sasaran program yang tepat melalui perencanaan yang optimal memperlancar pelaksanaan aktivitas/program yang pada akhirnya berimplikasi pada idealnya penyerapan anggaran
2. proses pengadaan barang dan jasa melalui penyedia/swakelola secara efisien dan efektif serta tepat waktu mempermudah penyerapan anggaran.
3. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi mempercepat proses penyerapan anggaran.

Tabel 3. 36
Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Setelah
P-APBD Per Sub Kegiatan Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	%
Sekretariat Daerah	29.444.689.696,00	235.997.078.013,00	203.400.576.968,00	86,19
Sekretariat Daerah	229.444.689.696,00	235.997.078.013,00	203.400.576.968,00	86,19
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	161.612.078.196,00	168.239.110.235,00	139.391.896.264,00	82,85
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.000.000,00	184.000.000,00	176.397.000,00	95,87
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	184.000.000,00	184.000.000,00	176.397.000,00	95,87
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.683.893.840,00	57.444.093.340,00	53.623.170.518,00	93,35
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55.633.893.840,00	57.394.093.340,00	53.576.380.018,00	93,35
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	46.790.500,00	93,58
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	134.407.800,00	76,8
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	175.000.000,00	175.000.000,00	134.407.800,00	76,8
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	495.000.000,00	495.000.000,00	363.480.000,00	73,43
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	495.000.000,00	495.000.000,00	363.480.000,00	73,43
Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.336.400.000,00	8.777.150.000,00	7.308.212.437,00	83,26
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,00	180.000.000,00	172.798.000,00	96
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.884.400.000,00	4.195.150.000,00	3.737.649.700,00	89,09
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300.000.000,00	300.000.000,00	272.175.000,00	90,73
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	56.955.000,00	56,96
Fasilitasi Kunjungan Tamu	500.000.000,00	600.000.000,00	562.775.000,00	93,8
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.252.000.000,00	3.252.000.000,00	2.365.769.737,00	72,75
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	140.090.000,00	93,39
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.739.016.976,00	27.339.016.976,00	12.471.060.000,00	45,62
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.600.000.000,00	9.200.000.000,00	8.536.200.000,00	92,78
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.139.016.976,00	18.139.016.976,00	3.934.860.000,00	21,69

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.011.273.420,00	19.006.273.420,00	17.072.039.415,00	89,82
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	-	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.536.759.800,00	7.536.759.800,00	6.200.179.590,00	82,27
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	792.182.500,00	792.182.500,00	456.743.000,00	57,66
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.677.331.120,00	10.677.331.120,00	10.415.116.825,00	97,54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.200.000.000,00	37.640.725.996,00	35.423.098.869,00	94,11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.093.496.429,00	91,12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	1.091.308.492,00	87,3
Pemeliharaan Mebel	150.000.000,00	150.000.000,00	147.630.000,00	98,42
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.500.000.000,00	32.270.725.996,00	30.385.259.111,00	94,16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.350.000.000,00	2.770.000.000,00	2.705.404.837,00	97,67
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.528.298.960,00	6.296.965.503,00	4.727.891.292,00	75,08
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	679.349.960,00	1.090.763.960,00	614.173.549,00	56,31
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	83.025.000,00	55,35
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	10.596.000,00	35,32
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.668.949.000,00	5.026.201.543,00	4.020.096.743,00	79,98
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.205.100.000,00	2.826.790.000,00	1.900.679.301,00	67,24
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.105.100.000,00	1.105.100.000,00	901.135.591,00	81,54
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.100.000.000,00	1.721.690.000,00	999.543.710,00	58,06
Penataan Organisasi	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	962.318.760,00	91,65
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	300.000.000,00	300.000.000,00	269.081.615,00	89,69
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250.000.000,00	250.000.000,00	239.496.600,00	95,8
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	300.000.000,00	300.000.000,00	269.340.375,00	89,78

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	184.400.170,00	92,2
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.004.095.000,00	7.004.095.000,00	5.229.140.872,00	74,66
Fasilitasi Keprotokolan	541.103.000,00	541.103.000,00	447.745.000,00	82,75
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.762.992.000,00	1.762.992.000,00	469.282.000,00	26,62
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	4.312.113.872,00	91,75
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	60.311.339.500,00	60.816.173.157,00	57.855.265.044,00	95,13
Administrasi Tata Pemerintahan	18.403.206.000,00	18.499.419.657,00	17.205.307.524,00	93
Penataan Administrasi Pemerintahan	800.000.000,00	800.000.000,00	396.830.989,00	49,6
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	16.903.206.000,00	17.067.599.657,00	16.257.507.985,00	95,25
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	700.000.000,00	631.820.000,00	550.968.550,00	87,20
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	38.991.172.500,00	39.399.792.500,00	38.393.454.122,00	97,45
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.791.172.500,00	8.199.792.500,00	7.433.580.360,00	90,66
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.266.651.400,00	96,89
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	23.700.000.000,00	23.700.000.000,00	23.693.222.362,00	99,97
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	643.050.427,00	64,31
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	201.473.299,00	57,56
Fasilitasi Bantuan Hukum	550.000.000,00	550.000.000,00	403.397.838,00	73,35
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100.000.000,00	100.000.000,00	38.179.290,00	38,18
Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.916.961.000,00	1.916.961.000,00	1.613.452.971,00	84,17
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.486.961.000,00	1.486.961.000,00	1.223.905.771,00	82,31
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	430.000.000,00	430.000.000,00	389.547.200,00	90,59
Program Perekonomian Dan Pembangunan	7.521.272.000,00	6.941.794.621,00	6.153.415.660,00	88,64
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	800.700.000,00	1.012.582.821,00	802.084.968,00	79,21
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	375.700.000,00	375.700.000,00	240.235.045,00	63,94
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	250.000.000,00	250.000.000,00	186.935.163,00	74,77
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	175.000.000,00	386.882.821,00	374.914.760,00	96,91
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.745.572.000,00	3.954.211.800,00	3.527.336.732,00	89,2
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	200.000.000,00	332.755.000,00	259.132.760,00	77,87
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4.295.572.000,00	3.371.456.800,00	3.033.119.808,00	89,96

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	250.000.000,00	250.000.000,00	235.084.164,00	94,03
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.975.000.000,00	1.975.000.000,00	1.823.993.960,00	92,35
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	775.000.000,00	775.000.000,00	702.231.865,00	90,61
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	700.000.000,00	700.000.000,00	622.490.345,00	88,93
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	500.000.000,00	500.000.000,00	499.271.750,00	99,85
	229.444.689.696,00	235.997.078.013,00	203.400.576.968,00	86,19

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi <https://simplerbang.bekasikota.go.id/> tahun 2024

3.5 Prestasi Dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 37

Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Tanggal	Uraian	Penghargaan Dari
1	29 Februari 2024	Penghargaan Sertifikat Kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi Atas Prestasi Dalam Akselerasi Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Dengan Kategori BB (BAIK SEKALI)	Gubernur Jawa Barat
2	14 November 2024	Penghargaan Pejabat Kepala Daerah Berdasarkan Hasil Elektronik Monitoring & Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, Komisi Informasi Jawa Barat Memberikan Predikat Sebagai Badan Publik Kategori Pemerintah Kota Yang Informatif	KI (Komisi Informasi) Provinsi Jawa Barat
3	05 Desember 2024	Penghargaan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tk. Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dari Ombudsman	Ombudsman
4	16 Desember 2024	Penghargaan Dari Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepada Pemerintah Kota Bekasi Dengan Predikat	Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

		Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023	
--	--	---	--

Sumber: Data Bagian Humas, 2024



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya sebagai upaya pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

4.1 kesimpulan

Pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Bekasi menetapkan 3 Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Sasaran / Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi 12 (dua belas) Bagian di Sekretariat Daerah Kota Bekasi, dengan hasil capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar 112,23 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang SANGAT BAIK dan signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Beberapa poin penting akan dijabarkan dibawah ini:

1. Pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran, sebesar 123,97 persen.
2. Pencapaian sasaran strategis 2 Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran, sebesar 100.99 persen
3. Pencapaian sasaran strategis 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja, memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebesar 112,06 persen.

Berdasarkan rata-rata setiap sasaran tersebut dapat dihasilkan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 yaitu 112,23 persen Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2024 ada pada Melampaui/memenuhi Target. Capaian dari IKU tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4. 1
 Capaian dari IKU tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Capaian IKK yang meningkat	40%	49.59%	123.97
2.	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	88	88.87	100.99
3.	Nilai AKIP SETDA	A (82.04)	A (82.04)	100
4.	Nilai IKM SETDA	83	88.13	106.18
5.	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	22,73	29.55	129.98

Dari lima target IKU yang telah di tetapkan untuk tahun 2024 keseluruhan indikator dapat dicapai bahkan untuk bebrapa indikator dapat melampaui target.

Walaupun secara umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi dapat melampaui target kinerja yang telah ditetapkan namun masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah antara lain adalah:

1. Belum optimalnya pemahaman atas data - data yang terkait dengan informasi kinerja, sehingga tidak memberikan informasi yang cukup bagi penyusun untuk melakukan analisis atas capaian kinerja. Data yang tersedia umumnya hanya data penyerapan anggaran serta realisasi fisik pekerjaan yang bersifat keluaran (output).
2. Belum optimalnya koordinasi perencanaan antar Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi, sehingga masih terdapat kecenderungan perencanaan bersifat sektoral dan menyebabkan daya

dorong terhadap tercapainya impact (dampak) dari program kegiatan Sekretariat Daerah belum maksimal.

4.2 Rencana Tindak

Untuk lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian visi dan misi, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai perumus kebijakan, koordinator pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja sekretariat daerah melalui koordinasi internal Sekretariat Daerah, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Sekretariat Daerah.
4. Secara internal perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antar Bagian sehingga dapat integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lingkup Sekretariat Daerah dapat terlaksana dengan optimal;

Sebagai upaya meningkatkan dan mempertahankan kinerja diharapkan bahwa LKIP tahun 2024 ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja

(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang di Lingkup Sekretariat Daerah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Junaedi
Jabatan : Sekretaris Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

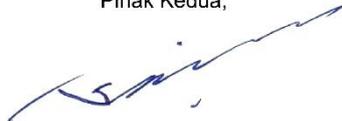
Nama : R. Gani Muhamad
Jabatan : Pj. Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



R. Gani Muhamad

Bekasi, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,



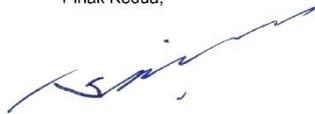
Drs. Junaedi
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19661006 198603 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Persentase Capaian IKK yang meningkat	40%
2	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	88
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas	22,73%
		Nilai AKIP SETDA	A
		Nilai IKM SETDA	83

Program	Anggaran	Ket (APBD/ PAD/ DAU/ HIBAH/ dll)
1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 60,311,339,500	APBD
2 Perekonomian Dan Pembangunan	Rp 7,521,272,000	APBD
3 Administrasi Umum	Rp 161,612,078,196	APBD
Total	Rp 229,444,689,696	

Pihak Kedua,



R. Gani Muhamad

Bekasi, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,



Drs. JUNAEDI
 Pembina Utama Muda/ IV.c
 NIP. 19661006 198603 1 008

LAMPIRAN 2 : Perjanjian Kinerja Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Junaedi
Jabatan : Sekretaris Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : R. Gani Muhamad
Jabatan : Pj. Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



R. Gani Muhamad

Bekasi, 04 November 2024

Pihak Pertama,



Drs. Junaedi
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 19661006 198603 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Persentase Capaian IKK yang meningkat	40%
2	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	88
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas	22,73%
		Nilai AKIP SETDA	A
		Nilai IKM SETDA	83

Program	Anggaran	Ket (APBD/ PAD/ DAU/ HIBAH/ dll)
1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 60,816,173,157	APBD
2 Perekonomian Dan Pembangunan	Rp 6,941,794,621	APBD
3 Administrasi Umum	Rp 168,239,110,235	APBD
Total	Rp 235,997,078,013	

Pihak Kedua,



R. Gani Muhamad

Bekasi, 04 November 2024

Pihak Pertama,



Drs. JUNAEDI
 Pembina Utama Madya/ IV.d
 NIP. 19661006 198603 1 008

LAMPIRAN 3
Rincian Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Murni	Perubahan
Sekretariat Daerah	229,444,689,696.00	235,997,078,013.00
Sekretariat Daerah	229,444,689,696.00	235,997,078,013.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	161,612,078,196.00	168,239,110,235.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184,000,000.00	184,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	184,000,000.00	184,000,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55,683,893,840.00	57,444,093,340.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55,633,893,840.00	57,394,093,340.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50,000,000.00	50,000,000.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	175,000,000.00	175,000,000.00
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	175,000,000.00	175,000,000.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	495,000,000.00	495,000,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	495,000,000.00	495,000,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,336,400,000.00	8,777,150,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000.00	180,000,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,884,400,000.00	4,195,150,000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300,000,000.00	300,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,000,000.00	100,000,000.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	500,000,000.00	600,000,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,252,000,000.00	3,252,000,000.00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150,000,000.00	150,000,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24,739,016,976.00	27,339,016,976.00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6,600,000,000.00	9,200,000,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,139,016,976.00	18,139,016,976.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19,011,273,420.00	19,006,273,420.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	-

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Murni	Perubahan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,536,759,800.00	7,536,759,800.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	792,182,500.00	792,182,500.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,677,331,120.00	10,677,331,120.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36,200,000,000.00	37,640,725,996.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,000,000,000.00	1,250,000,000.00
Pemeliharaan Mebel	150,000,000.00	150,000,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31,500,000,000.00	32,270,725,996.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,350,000,000.00	2,770,000,000.00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5,528,298,960.00	6,296,965,503.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	679,349,960.00	1,090,763,960.00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150,000,000.00	150,000,000.00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4,668,949,000.00	5,026,201,543.00
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3,205,100,000.00	2,826,790,000.00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1,105,100,000.00	1,105,100,000.00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2,100,000,000.00	1,721,690,000.00
Penataan Organisasi	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	300,000,000.00	300,000,000.00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250,000,000.00	250,000,000.00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	300,000,000.00	300,000,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	200,000,000.00	200,000,000.00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Murni	Perubahan
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7,004,095,000.00	7,004,095,000.00
Fasilitasi Keprotokolan	541,103,000.00	541,103,000.00
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,762,992,000.00	1,762,992,000.00
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4,700,000,000.00	4,700,000,000.00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	60,311,339,500.00	60,816,173,157.00
Administrasi Tata Pemerintahan	18,403,206,000.00	18,499,419,657.00
Penataan Administrasi Pemerintahan	800,000,000.00	800,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	16,903,206,000.00	17,067,599,657.00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	700,000,000.00	631,820,000.00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	38,991,172,500.00	39,399,792,500.00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7,791,172,500.00	8,199,792,500.00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	23,700,000,000.00	23,700,000,000.00
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	350,000,000.00	350,000,000.00
Fasilitasi Bantuan Hukum	550,000,000.00	550,000,000.00
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100,000,000.00	100,000,000.00
Fasilitasi Kerjasama Daerah	1,916,961,000.00	1,916,961,000.00
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1,486,961,000.00	1,486,961,000.00
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	430,000,000.00	430,000,000.00
Program Perekonomian Dan Pembangunan	7,521,272,000.00	6,941,794,621.00
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	800,700,000.00	1,012,582,821.00
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	375,700,000.00	375,700,000.00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	250,000,000.00	250,000,000.00
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	175,000,000.00	386,882,821.00
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4,745,572,000.00	3,954,211,800.00
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	200,000,000.00	332,755,000.00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4,295,572,000.00	3,371,456,800.00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Murni	Perubahan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	250,000,000.00	250,000,000.00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,975,000,000.00	1,975,000,000.00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	775,000,000.00	775,000,000.00
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	700,000,000.00	700,000,000.00
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	500,000,000.00	500,000,000.00
JUMLAH	229,444,689,696.00	235,997,078,013.00

LAMPIRAN 4

Realisasi Fisik Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME / OUTPUT		ANGGARAN	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			FISIK	Rp (%)		FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Target	100%	168.239.110.235		18,08		27,03		29,38		25,51
			Realisasi	100%			9,64		24,62		18,69		29,91
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Target	100%	184.000.000	25%	-	25%	45,65	25%	-	25%	54,35
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Target	20 Dokumen	184.000.000	6 Dokumen	-	3 Dokumen	45,65	9 Dokumen	-	2 Dokumen	54,35
			Realisasi			6 Dokumen	-	3 Dokumen	-	9 Dokumen	-	2 Dokumen	95,87
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	Target	100%	57.444.093.340	25%	21,41	25%	31,17	25%	21,88	25%	25,54
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Target	5474 OB	57.394.093.340	1368 OB	21,40	1564 OB	31,17	1173 OB	21,88	1369 OB	25,55
			Realisasi			1389 OB	15,22	1986 OB	33,73	1389 OB	20,11	1389 OB	24,29
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Target	16 Laporan	50.000.000	4 Laporan	30,00	4 Laporan	30,00	4 Laporan	20,00	4 Laporan	20,00
			Realisasi			4 Laporan	-	4 Laporan	30,00	4 Laporan	30,00	4 Laporan	33,58
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Target	100%	495.000.000	25%	4,04	25%	53,66	25%	27,34	25%	14,96
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Target	50 Orang	495.000.000	-	4,04	20 Orang	53,66	20 Orang	27,34	10 Orang	14,96
			Realisasi			-	-	8 Orang	-	105 Orang	17,71	-	55,72
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat	Target	100%	8.777.150.000		19,13		29,42		32,44	100%	19,02
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Target	40 Paket	180.000.000	-	83,33	40 Paket	-	-	-	-	16,67
			Realisasi			-	-	-	-	40 Paket	82,45	-	15,22
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Target	30044 Paket	4.195.150.000	-	14,07	2755 Paket	32,74	25589 Paket	36,49	1700 Paket	16,70
			Realisasi			-	4,24	2755 Paket	32,21	21310 Paket	18,92	5979 Paket	33,73
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Target	9530 Paket	300.000.000	-	56,54	6320 Paket	10,83	2410 Paket	15,46	800 Paket	17,17
			Realisasi			-	-	6320 Paket	-	7580 Paket	52,25	-	38,47
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Target	2 Dokumen	100.000.000	-	15,00	1 Dokumen	20,00	-	20,00	1 Dokumen	45,00
			Realisasi			-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	56,96
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Target	4 Laporan	600.000.000	1 Laporan	22,38	1 Laporan	31,81	1 Laporan	17,49	1 Laporan	28,33
			Realisasi			1 Laporan	22,38	1 Laporan	21,61	1 Laporan	21,70	1 Laporan	28,11

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME / OUTPUT		ANGGARAN	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			FISIK	Rp (%)		FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Target	1 Laporan	3.252.000.000	-	19,07	-	25,06	-	35,21	1 Laporan	20,66
			Realisasi			-	6,88	-	11,46	-	19,29	1 Laporan	35,11
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Target	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	100,00	-	-	1 Dokumen	-
			Realisasi			-	-	-	-	1 Dokumen	93,39	-	-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Target	100%	19.006.273.420	25%	22,65	25%	24,82	25%	24,95	25%	27,58
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Target	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-
			Realisasi			-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Target	12 Laporan	7.536.759.800	3 Laporan	26,75	3 Laporan	26,19	3 Laporan	25,71	3 Laporan	21,35
			Realisasi			3 Laporan	20,84	3 Laporan	18,65	3 Laporan	20,85	3 Laporan	21,92
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Target	12 Laporan	792.182.500	3 Laporan	14,52	3 Laporan	21,90	3 Laporan	29,50	3 Laporan	34,08
			Realisasi			3 Laporan	-	3 Laporan	17,24	3 Laporan	23,77	3 Laporan	16,64
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Target	12 Laporan	10.677.331.120	2 Laporan	20,36	3 Laporan	24,07	3 Laporan	24,07	4 Laporan	31,50
			Realisasi			2 Laporan	15,46	3 Laporan	27,17	3 Laporan	23,52	4 Laporan	31,40
6	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Target	100%	6.296.965.503	25%	21,69	25%	23,98	25%	21,82	25%	32,51
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Target	28 OB	1.090.763.960	8 OB	16,13	8 OB	27,31	6 OB	14,85	6 OB	41,71
			Realisasi			-	-	-	15,35	-	13,04	28 OB	27,92
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Target	54 Paket	150.000.000	-	15,00	-	20,00	-	30,00	-	35,00
			Realisasi			-	-	-	-	26 Paket	50,95	-	4,40
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Target	4 Orang	30.000.000	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
			Realisasi			-	-	-	-	-	-	-	35,32
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Target	24 OB	5.026.201.543	4 OB	23,22	6 OB	23,22	6 OB	23,22	8 OB	30,33
			Realisasi			2 OB	12,39	3 OB	18,58	13 OB	18,58	6 OB	30,44
7	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tingkat Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Target	100%	2.826.790.000	25%	14,11	25%	29,34	25%	41,35	25%	15,19
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Target	12 Paket	1.105.100.000	3 Paket	15,00	3 Paket	20,00	3 Paket	23,37	3 Paket	41,63
			Realisasi			3 Paket	7,96	3 Paket	11,07	3 Paket	40,54	3 Paket	21,96
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Target	11 Paket	1.721.690.000	3 Paket	13,54	3 Paket	35,34	3 Paket	52,89	3 Paket	(1,77)
			Realisasi			3 Paket	-	3 Paket	26,72	3 Paket	2,20	2 Paket	29,14

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME / OUTPUT		ANGGARAN	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)
8	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Target	100%	2.304.095.000	25%	37,37	25%	15,62	25%	22,66	25%	24,35
1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Target	1 Laporan	541.103.000	1 Laporan	100,00	-	-	-	-	-	-
			Realisasi			1 Laporan	-	-	82,75	-	-	-	-
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Target	1 Laporan	1.762.992.000	-	18,15	-	20,42	-	29,61	1 Laporan	31,82
			Realisasi			-	8,17	-	6,75	-	2,46	1 Laporan	9,25
		Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Target	100%	4.700.000.000		30,31		24,96		22,49	100%	22,24
			Realisasi	100%			3,36		14,16		28,07		46,16
9	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Target	100%	4.700.000.000		30,31		24,96		22,49		22,24
1	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Target	12 Laporan	4.700.000.000	2 Laporan	30,31	3 Laporan	24,96	4 Laporan	22,49	3 Laporan	22,24
			Realisasi			2 Laporan	3,36	3 Laporan	14,16	4 Laporan	28,07	3 Laporan	46,16
		Presentase Ketersediaan gedung pemerintahan dalam kondisi baik	Target	100%	37.640.725.996		20,96		28,29		28,56		22,19
			Realisasi	100%			7,13		23,93		21,88		41,17
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanhan Daerah	Target	100%	37.640.725.996	25%	20,96	25%	28,29	25%	28,56	25%	22,19
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Target	25 Unit	1.200.000.000	6 Unit	21,67	7 Unit	34,17	7 Unit	35,00	5 Unit	9,17
			Realisasi			6 Unit	4,17	7 Unit	23,41	7 Unit	21,35	5 Unit	42,19
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Target	143 Unit	1.250.000.000	25 Unit	14,40	40 Unit	31,20	45 Unit	25,20	33 Unit	29,20
			Realisasi			25 Unit	3,16	-	11,60	85 Unit	29,39	33 Unit	43,15
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Target	10 Unit	150.000.000	-	-	-	-	-	-	10 Unit	100,00
			Realisasi			-	-	-	-	-	-	10 Unit	98,42
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Target	30 Unit	32.270.725.996	3 Unit	21,69	7 Unit	28,56	13 Unit	27,11	7 Unit	22,64
			Realisasi			3 Unit	7,73	7 Unit	26,29	13 Unit	21,57	7 Unit	38,56
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Target	19 Unit	2.770.000.000	3 Unit	1,39	3 Unit	1,97	8 Unit	3,92	5 Unit	15,16
			Realisasi			3 Unit	3,53	3 Unit	3,53	8 Unit	23,45	5 Unit	67,16
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Kebutuhan	Target	100%	27.514.016.976		0,03		18,38		50,66		30,93
			Realisasi				-		13,61		6,85		25,36
11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Target	100%	175.000.000		4,29		41,43		48,85	100%	5,44

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME / OUTPUT		ANGGARAN	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)
1	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Target	4 Laporan	175.000.000	1 Laporan	4,29	1 Laporan	41,43	1 Laporan	48,85	1 Laporan	5,44
			Realisasi			1 Laporan	-	1 Laporan	2,57	1 Laporan	35,14	1 Laporan	39,09
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	Target	100%	27.339.016.976		-		18,23		50,67	100%	31,09
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Target	31 Unit	9.200.000.000	-	-	7 Unit	54,18	10 Unit	13,32	11 Unit	32,50
			Realisasi			-	-	7 Unit	40,66	10 Unit	9,26	4 Unit	42,86
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Target	598 Unit	18.139.016.976	-	-	1 Unit	-	88 Unit	69,62	509 Unit	30,38
			Realisasi			-	-	1 Unit	-	88 Unit	5,35	16 Unit	16,35
		Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	Target	100%	850.000.000		16,81		36,15		30,57	100%	16,47
			Realisasi	100%			2,67		5,94		40,48		42,43
13	Penataan Organisasi	Persentase keterlaksanaan	Target	100%	850.000.000		16,81		36,15		30,57		16,47
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Target	2 Dokumen	300.000.000	-	20,31	-	46,87	2 Dokumen	23,52	-	9,30
			Realisasi			-	4,18	-	7,72	2 Dokumen	33,71	-	44,08
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Target	2 Laporan	250.000.000	-	15,65	1 Laporan	22,15	-	34,86	1 Laporan	27,33
			Realisasi			-	3,09	1 Laporan	5,38	-	11,63	1 Laporan	75,69
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Target	1 Dokumen	300.000.000	-	14,27	-	37,10	-	34,05	1 Dokumen	14,57
			Realisasi			-	0,80	-	4,62	-	71,30	1 Dokumen	13,06
		Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	Target	75%	200.000.000		15,60		19,72		30,06		34,61
			Realisasi	100%			-		17,38		35,49		39,33
		Persentase OPD yang mitas	Target	75%	200.000.000		15,60		19,72		30,06	75%	34,61
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Target	1 Dokumen	200.000.000	-	15,60	-	19,72	-	30,06	1 Dokumen	34,61
			Realisasi			-	-	-	17,38	-	35,49	1 Dokumen	39,33
II	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	Target	100%	60.816.173.157		27,59		45,67		20,17		6,58
			Realisasi	100%			1,66		3,90		65,96		23,62
		Persentase peningkatan profile kelurahan	Target	25%									
			Realisasi	100%									
		Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	Target	75%									
			Realisasi	79,55%									
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan dalam rangka pelaksanaan administrasi tata pemerintahan	Target	13 Kegiatan	18.499.419.657		79,50		11,68		8,21		0,61
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Target	3 Dokumen	800.000.000	-	16,31	-	25,24	1 Dokumen	26,56	2 Dokumen	31,89
			Realisasi			-	-	1 Dokumen	0,82	2 Dokumen	5,85	-	42,94

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME / OUTPUT		ANGGARAN	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Target	6 Dokumen	17.067.599.657	1 Dokumen	83,43	2 Dokumen	10,19	-	7,12	3 Dokumen	(0,75)
			Realisasi			1 Dokumen	-	2 Dokumen	3,05	-	86,90	3 Dokumen	5,30
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Target	3 Dokumen	631.820.000	3 Dokumen	53,27	-	34,71	-	14,30	-	(2,28)
			Realisasi			3 Dokumen	3,23	-	1,01	-	45,47	-	37,49
		Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya	Target	100%	39.399.792.500		4,16		62,71			100%	
			Realisasi	100%			2,44		3,42				
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	Target	100%								100%	
			Realisasi	100%									
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan ke	Target	25 Kegiatan	39.399.792.500		4,16		62,71		24,05		9,08
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Target	8 Dokumen	8.199.792.500	1 Dokumen	16,99	3 Dokumen	28,69	1 Dokumen	19,85	3 Dokumen	34,47
			Realisasi			1 Dokumen	11,72	3 Dokumen	14,02	1 Dokumen	21,06	3 Dokumen	43,86
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat	Target	1 Dokumen	7.500.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	31,65	-	-
			Realisasi			-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	96,89
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Target	1 Dokumen	23.700.000.000	-	1,03	-	94,32	-	1,48	1 Dokumen	3,16
			Realisasi			-	-	-	0,84	1 Dokumen	95,99	-	3,16
		Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	Target	100%	1.000.000.000		14,96		21,92			100%	
			Realisasi	100%			2,74		6,32				
		Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	Target	100%								100%	
			Realisasi	100%									
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah peraturan perunn	Target	3 Jenis	1.000.000.000		14,96		21,92		36,62		26,50
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Target	8 Dokumen	350.000.000	-	14,85	-	23,77	4 Dokumen	48,52	4 Dokumen	12,85
			Realisasi			-	4,91	-	4,50	1 Dokumen	13,39	7 Dokumen	34,77
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Target	8 Kasus	550.000.000	-	15,00	-	20,00	2 Kasus	30,00	6 Kasus	35,00
			Realisasi			-	1,87	-	8,36	1 Kasus	16,47	7 Kasus	46,65
3			Target	3 Dokumen	100.000.000	-	15,12	1 Dokumen	25,99	-	31,40	2 Dokumen	27,50

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME / OUTPUT		ANGGARAN	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			FISIK	Rp (%)		FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)		
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	Realisasi			-	-	-	1,51	1 Dokumen	3,85	2 Dokumen	32,83
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	Target	100%	1.916.961.000		14,82		35,72		47,07	100%	2,39
			Realisasi	100%			-		22,20		17,22		44,74
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kerj	Target	7 Kegiatan	1.916.961.000		14,82		35,72		47,07		2,39
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Target	4 Dokumen	1.486.961.000	-	16,65	-	40,36	-	40,50	4 Dokumen	2,49
			Realisasi			-	-	-	25,48	4 Dokumen	20,53	-	36,30
2	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Target	65 Laporan	430.000.000	18 Laporan	8,50	18 Laporan	19,67	18 Laporan	69,80	11 Laporan	2,04
			Realisasi			18 Laporan	-	18 Laporan	10,88	18 Laporan	5,78	11 Laporan	73,93
III	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	Target	100%	6.941.794.621		12,31		31,72		35,98	100%	20,00
			Realisasi	100%			2,82		24,72		21,83		39,28
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen kebijakan ekonomi	Target	8 Dokumen	1.012.582.821		6,37		9,04		40,64		43,95
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Target	3 Dokumen	375.700.000	-	17,17	-	11,45	2 Dokumen	64,15	1 Dokumen	7,24
			Realisasi			-	2,43	1 Dokumen	9,55	1 Dokumen	38,45	1 Dokumen	13,52
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Target	1 Laporan	250.000.000	-	-	-	17,61	-	-	1 Laporan	82,39
			Realisasi			-	-	1 Laporan	1,00	-	3,50	-	70,27
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Target	1 Dokumen	386.882.821	-	-	-	1,16	1 Dokumen	44,07	-	54,77
			Realisasi			-	-	-	0,63	1 Dokumen	42,27	-	54,00
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	Target	100%	3.954.211.800		11,74		39,75		35,14	100%	13,37
			Realisasi	100%			3,54		31,04		16,65		37,97
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen administrasi pembangunan	Target	155 Dokumen	3.954.211.800		11,74		39,75		35,14		13,37
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Target	3 Dokumen	332.755.000	-	6,28	-	23,65	-	27,53		42,54
			Realisasi			-	-	-	9,27	-	23,51	3 Dokumen	45,09
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Target	13 Laporan	3.371.456.800	-	13,14	-	38,02	-	37,91		10,92
			Realisasi			-	4,15	-	30,94	-	15,65	13 Laporan	39,23
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Target	18 Laporan	250.000.000	4 Laporan	-	5 Laporan	84,47	4 Laporan	7,92	5 Laporan	7,61
			Realisasi			4 Laporan	-	5 Laporan	61,40	4 Laporan	21,07	5 Laporan	11,57
		Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Target	100%	1.975.000.000		16,49		27,26		35,26		20,98
			Realisasi	100%			2,35		22,68		27,35		39,98
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah fasilitasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Target	8 Kegiatan	1.975.000.000		16,49		27,26		35,26		20,98
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Target	1 Dokumen	775.000.000	-	15,98	-	42,24	-	23,72	1 Dokumen	18,06
			Realisasi			-	5,40	-	43,91	-	13,71	1 Dokumen	27,59
2			Target	1 Dokumen	700.000.000	-	15,20	-	29,51	-	32,51	1 Dokumen	22,78

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME / OUTPUT		ANGGARAN	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)	FISIK	Rp (%)
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Realisasi			-	-	-	1,88	-	21,27	1 Dokumen	65,78
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Target	100 Orang	500.000.000	-	19,10	-	0,90	100 Orang	57,00	-	23,00
			Realisasi			-	0,90	-	18,89	100 Orang	57,00	-	23,06

LAMPIRAN 5

Prestasi Dan Penghargaan

Penghargaan Sertifikat Kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi Atas Prestasi Dalam Akselerasi Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Dengan Kategori BB (BAIK SEKALI)



Penghargaan Dari Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepada Pemerintah Kota Bekasi Dengan Predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023



Penghargaan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dari Ombudsman

